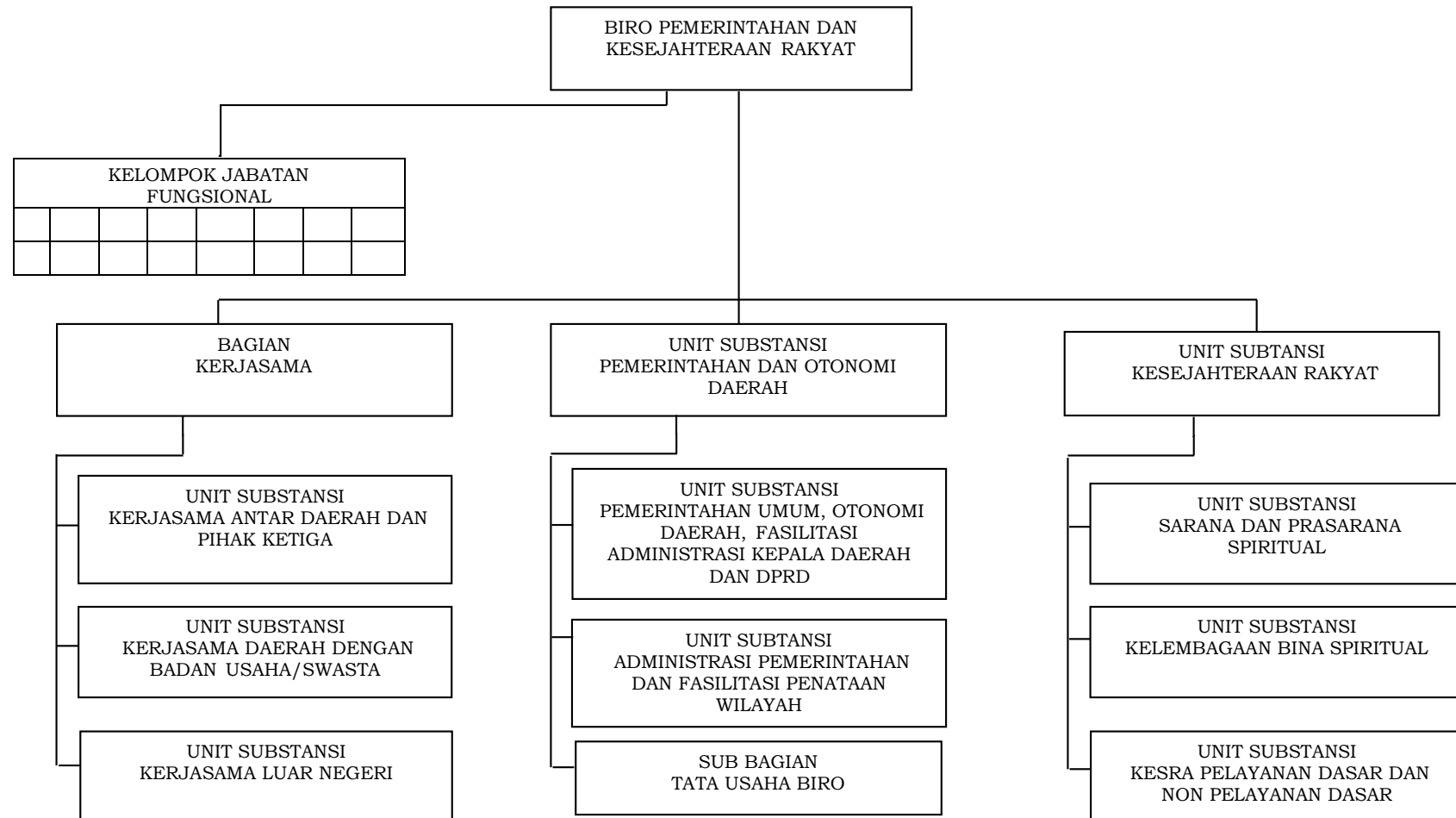


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

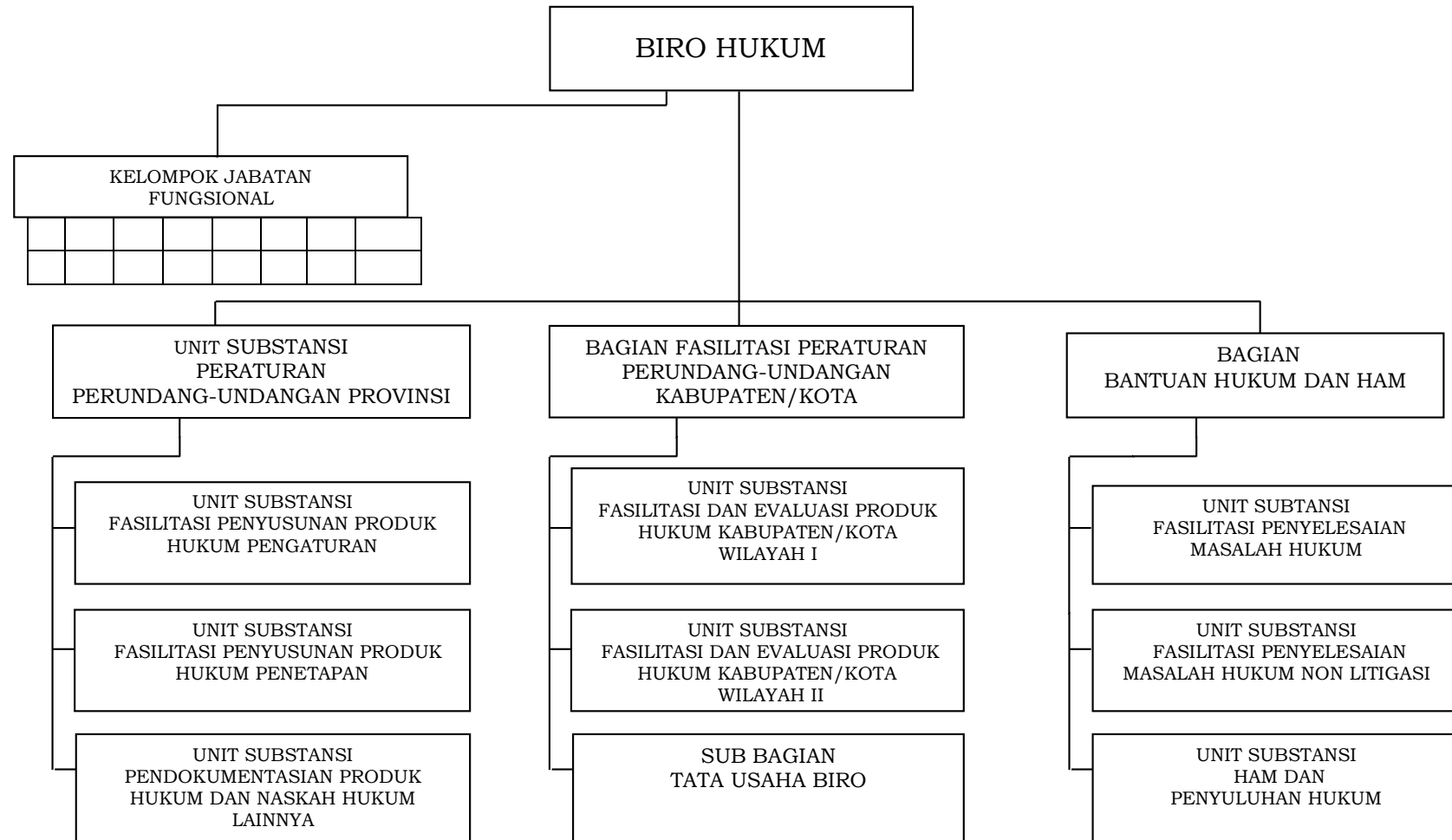
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

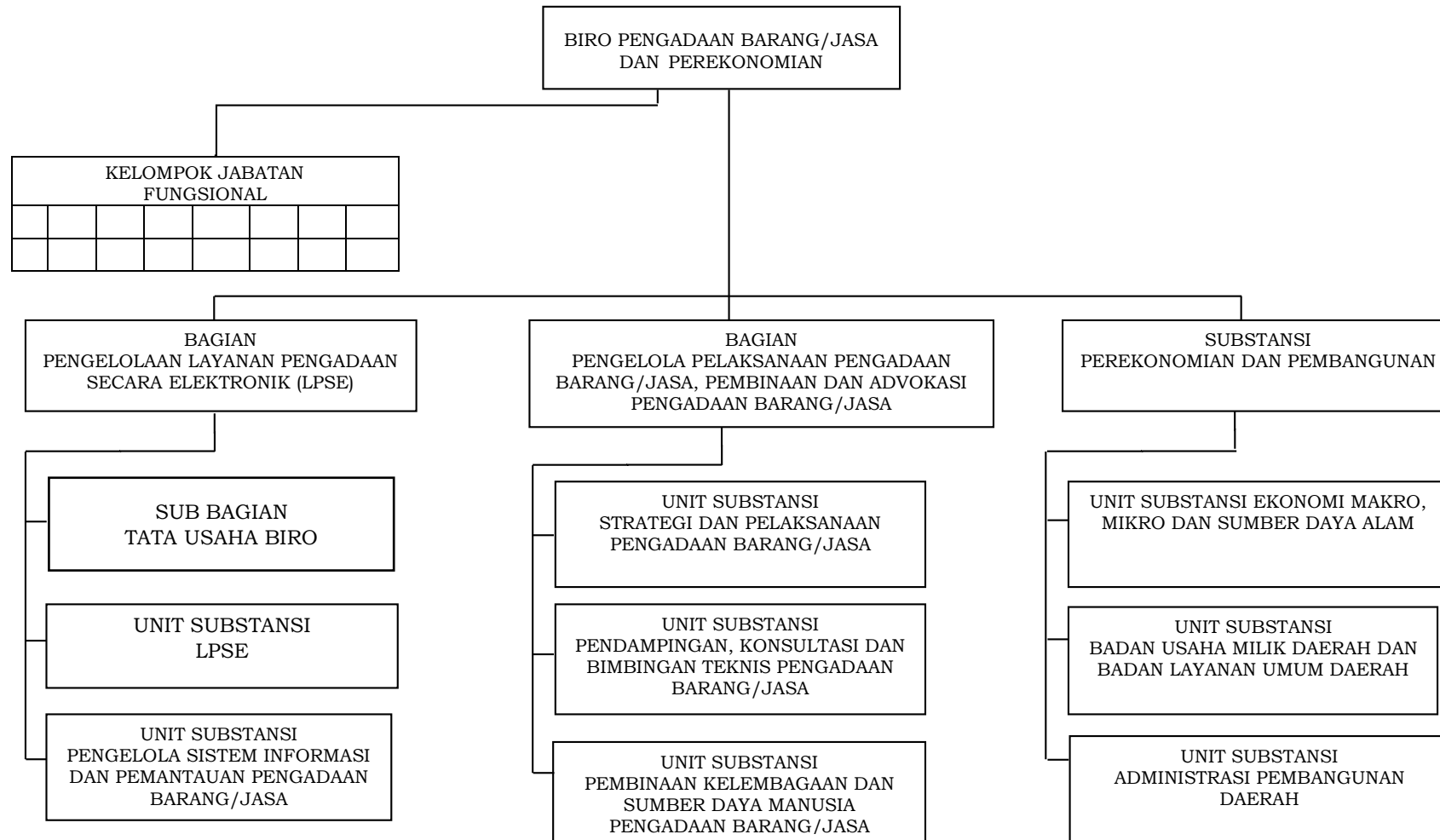
1. BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



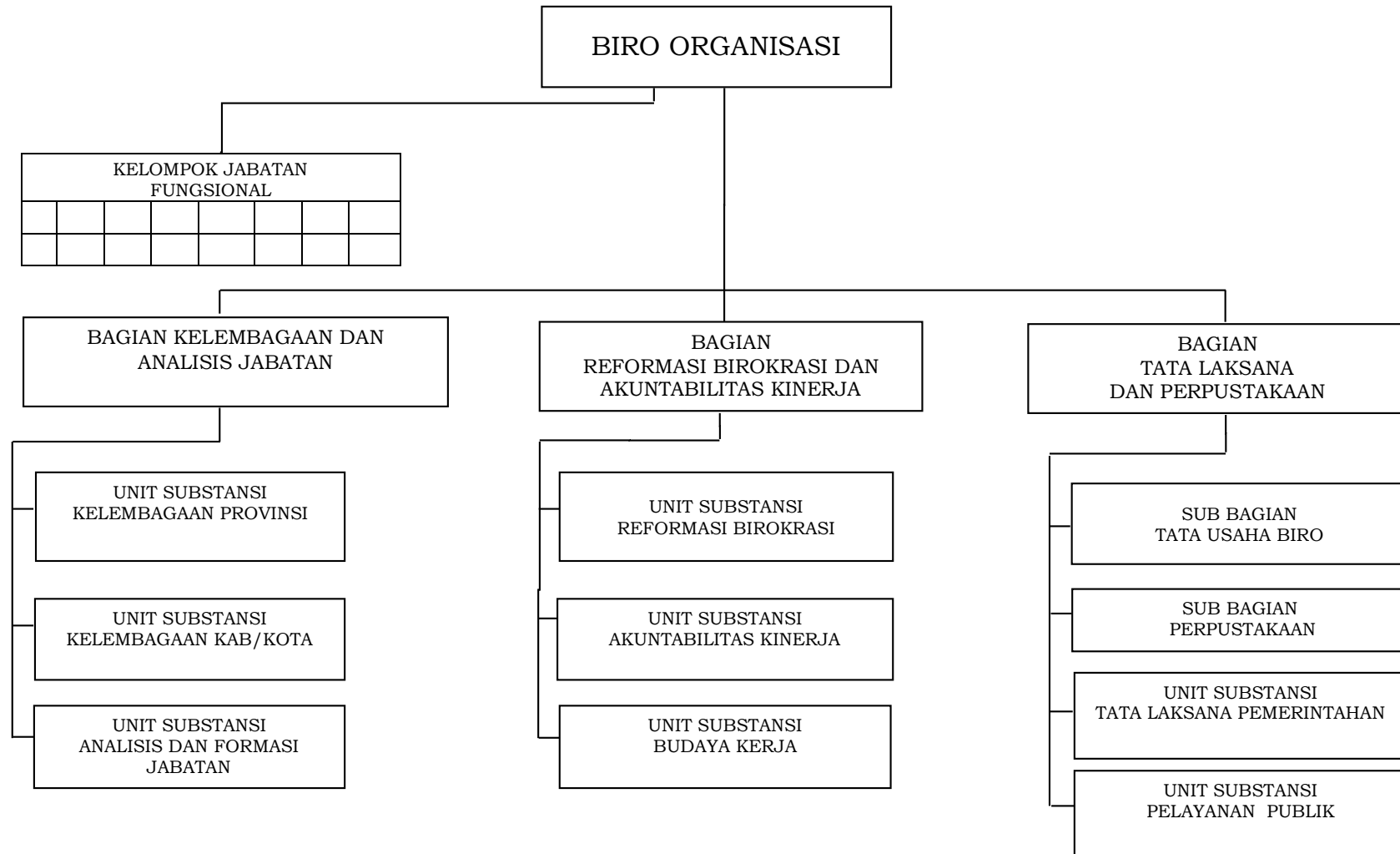
2. BIRO HUKUM



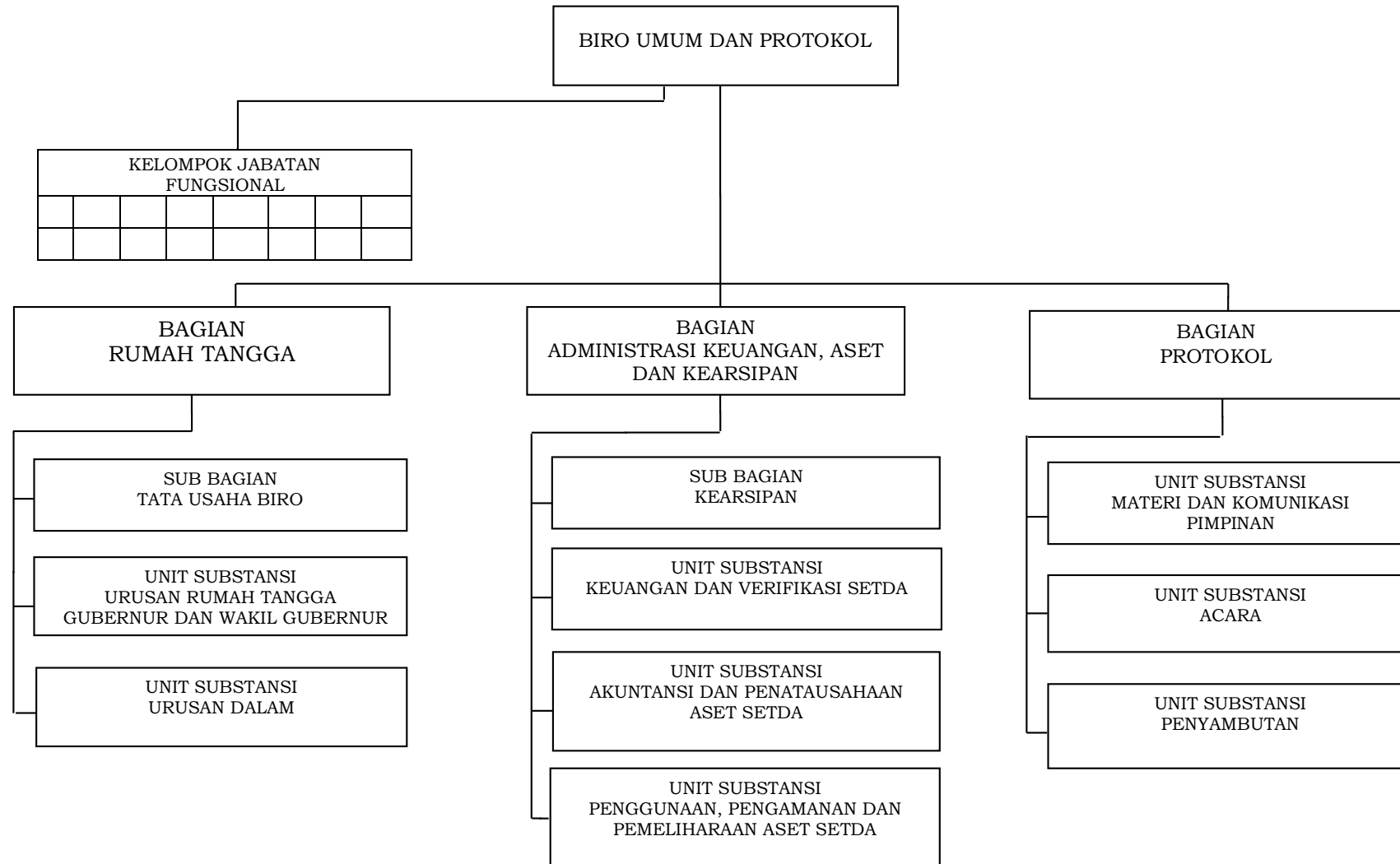
3. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN



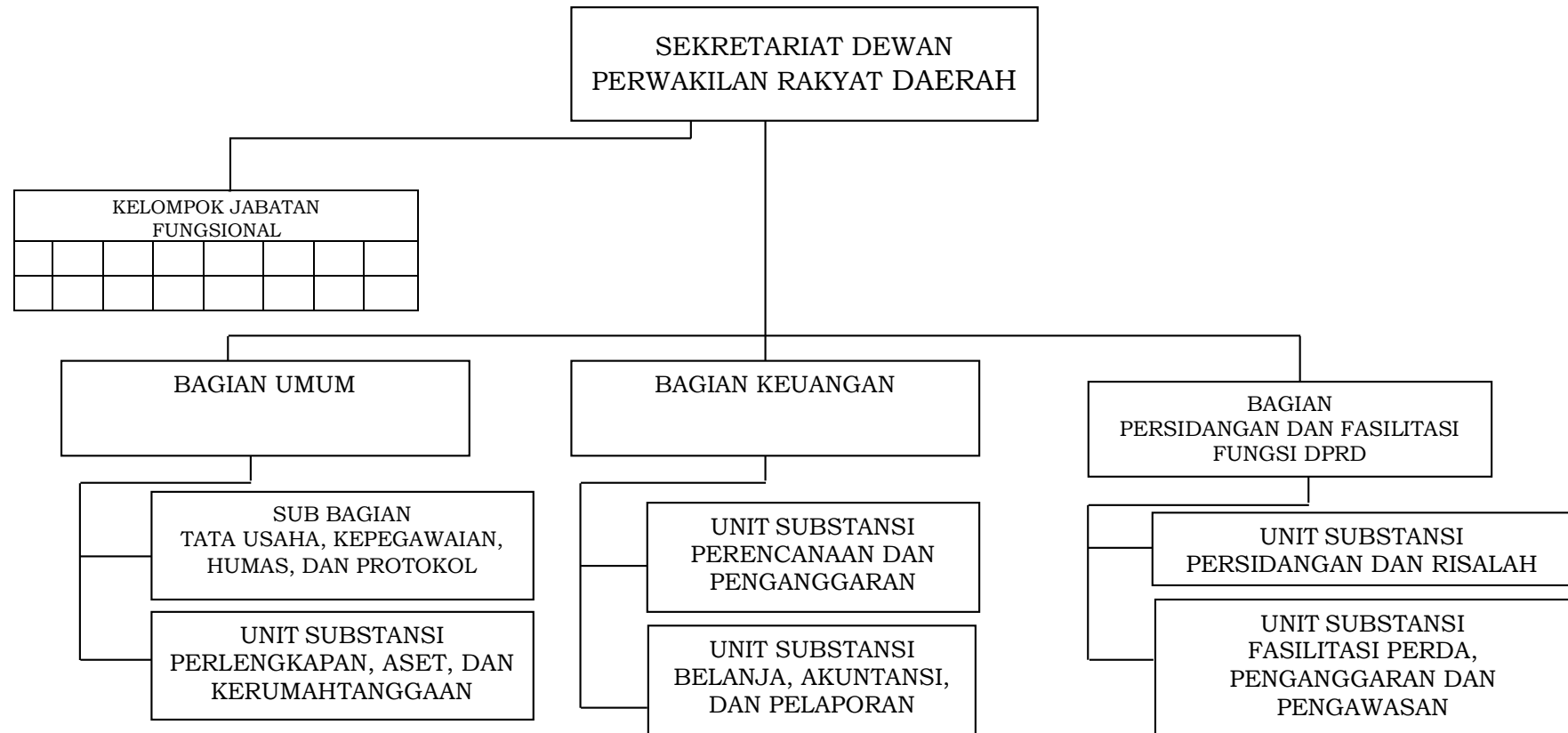
4. BIRO ORGANISASI



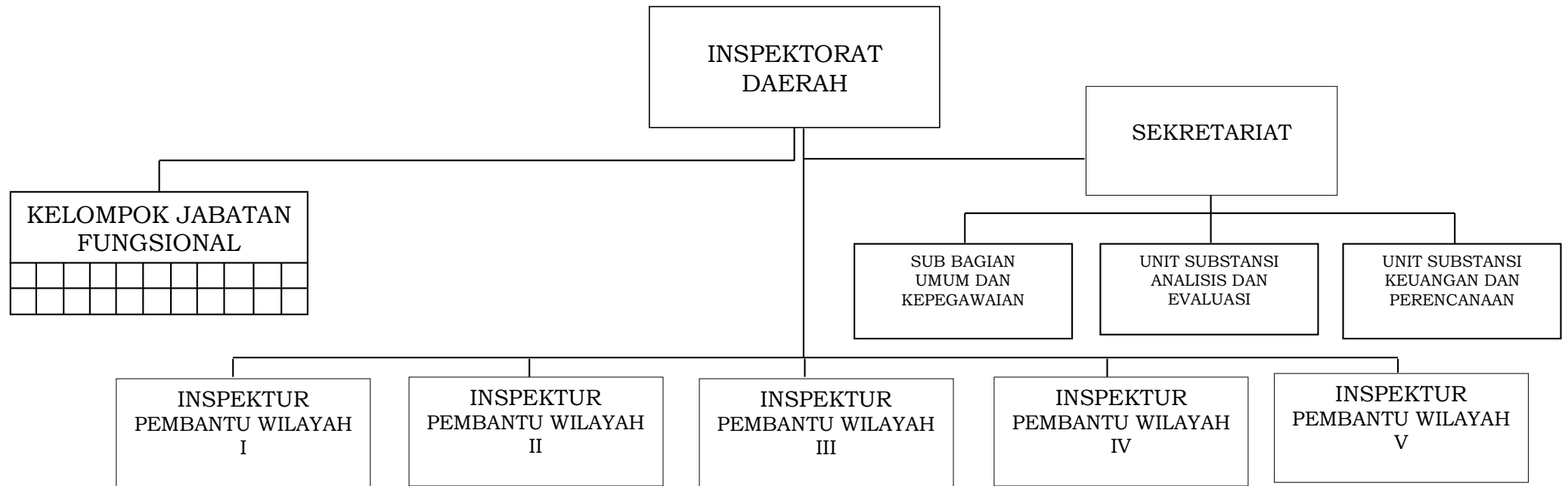
5. BIRO UMUM DAN PROTOKOL



B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

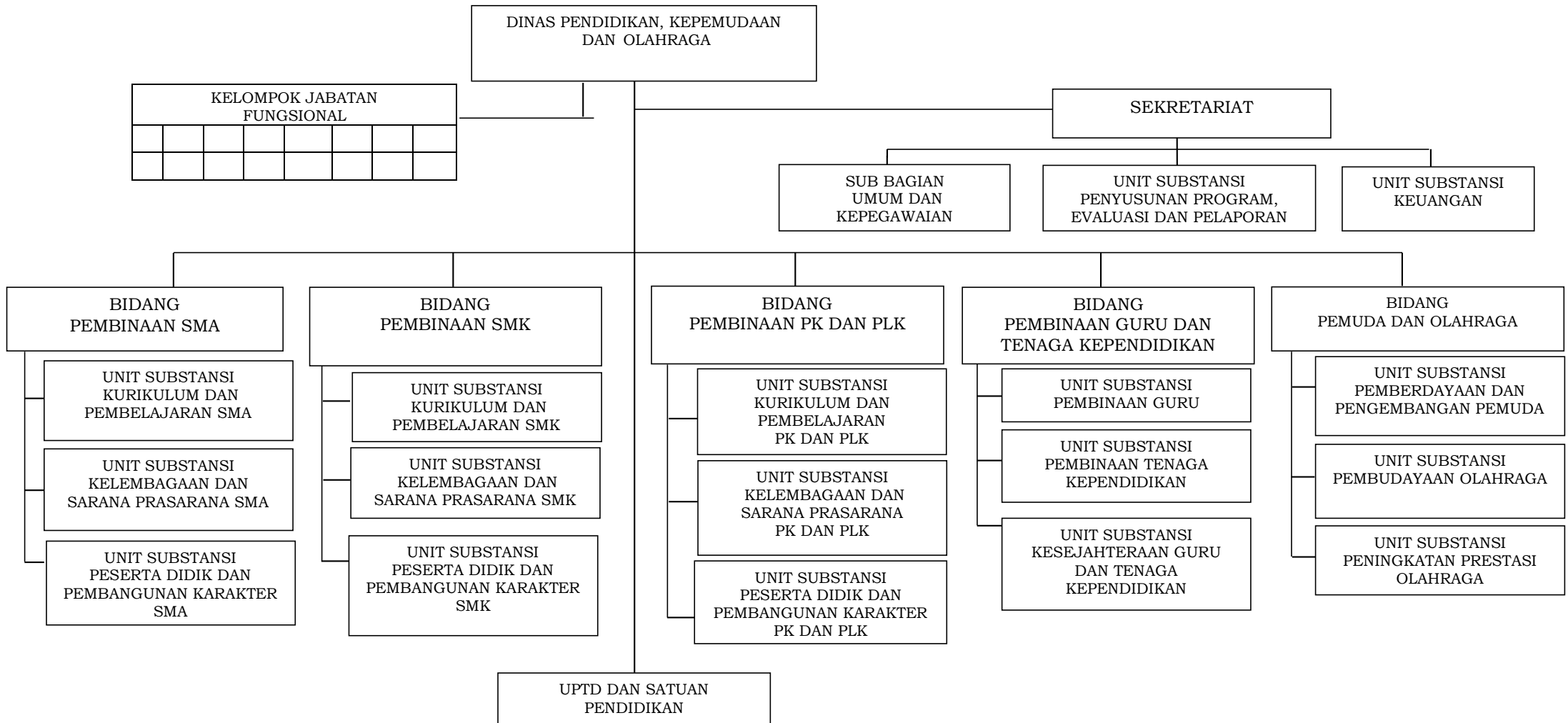


C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

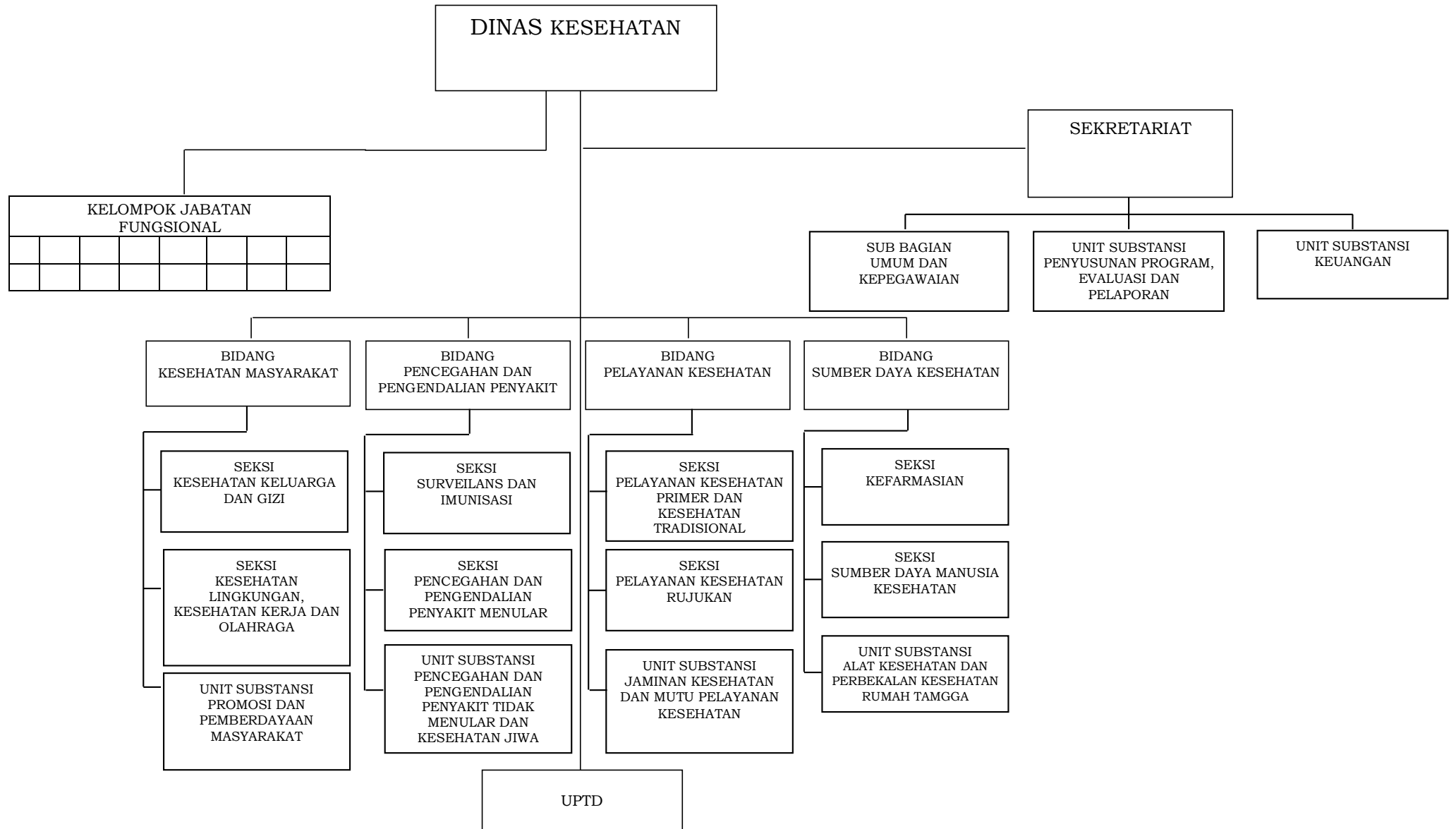


D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

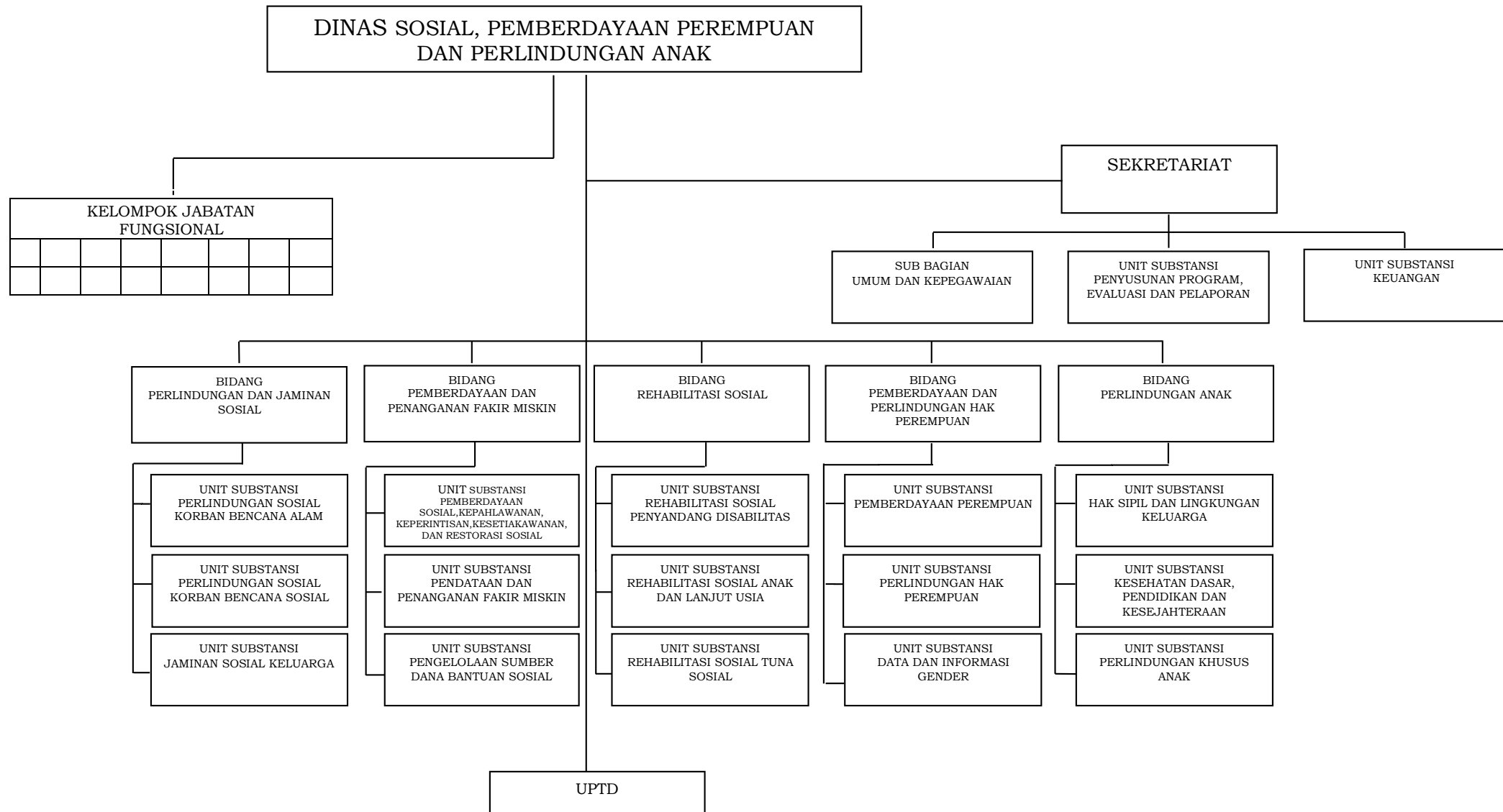
1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



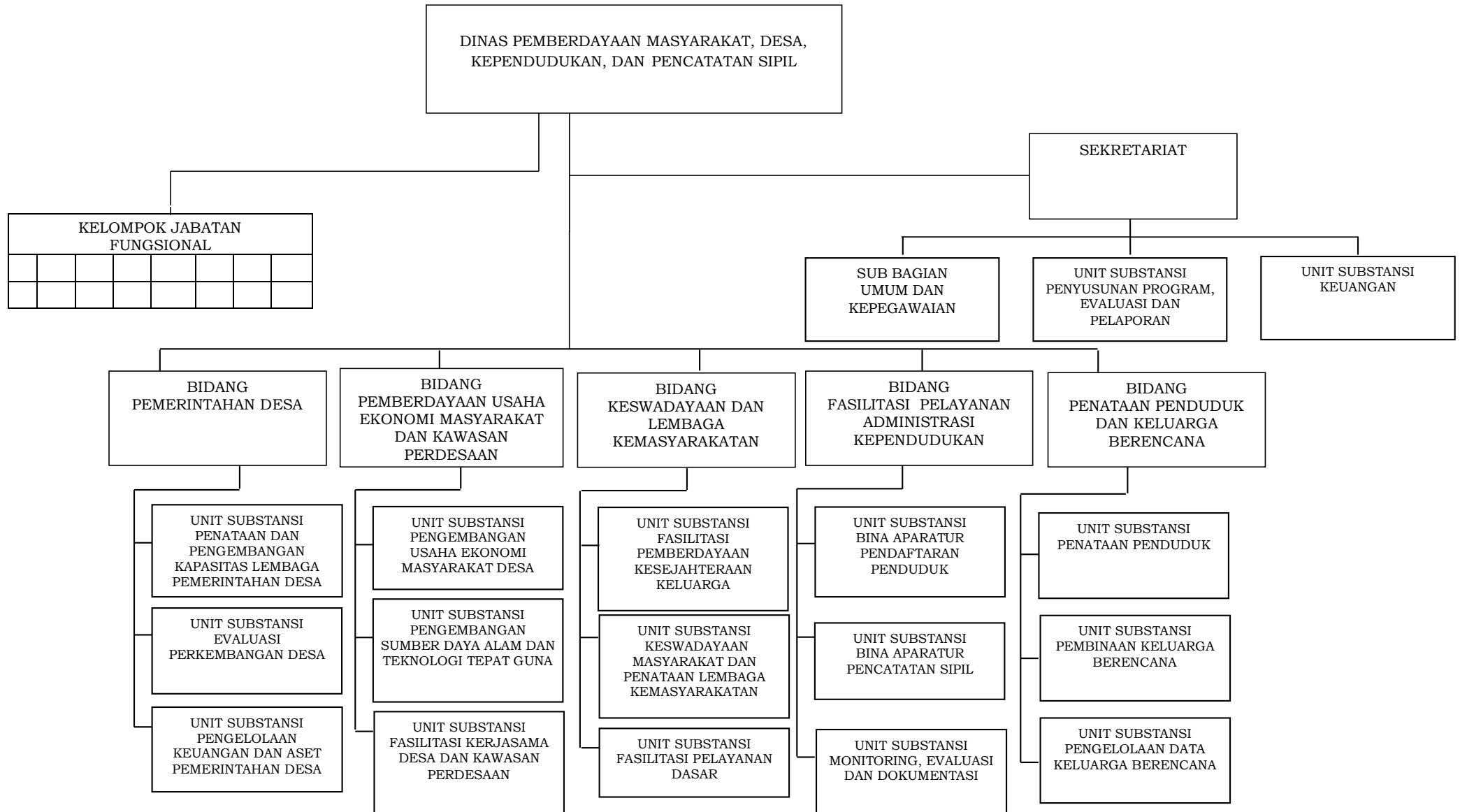
2. DINAS KESEHATAN



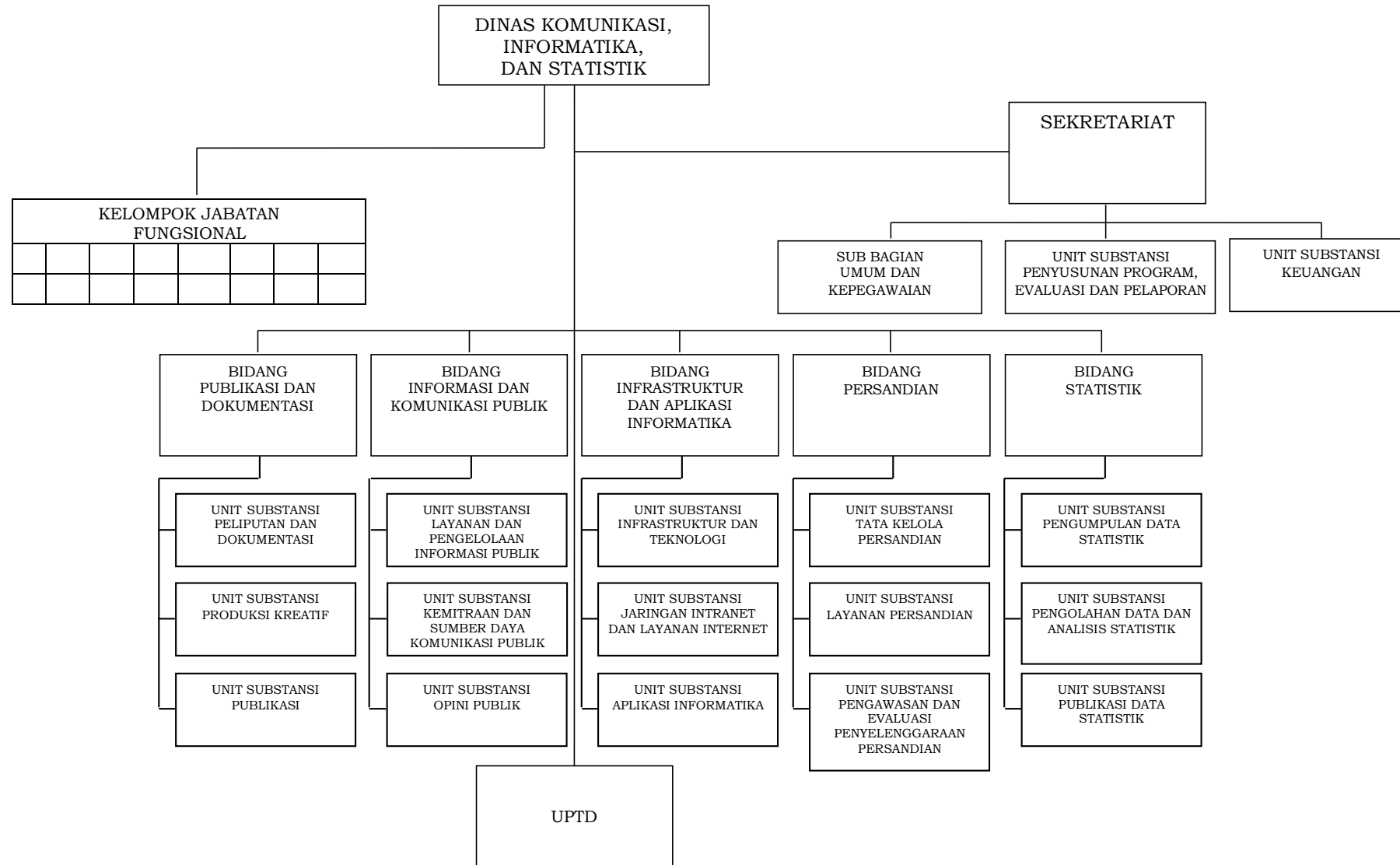
3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



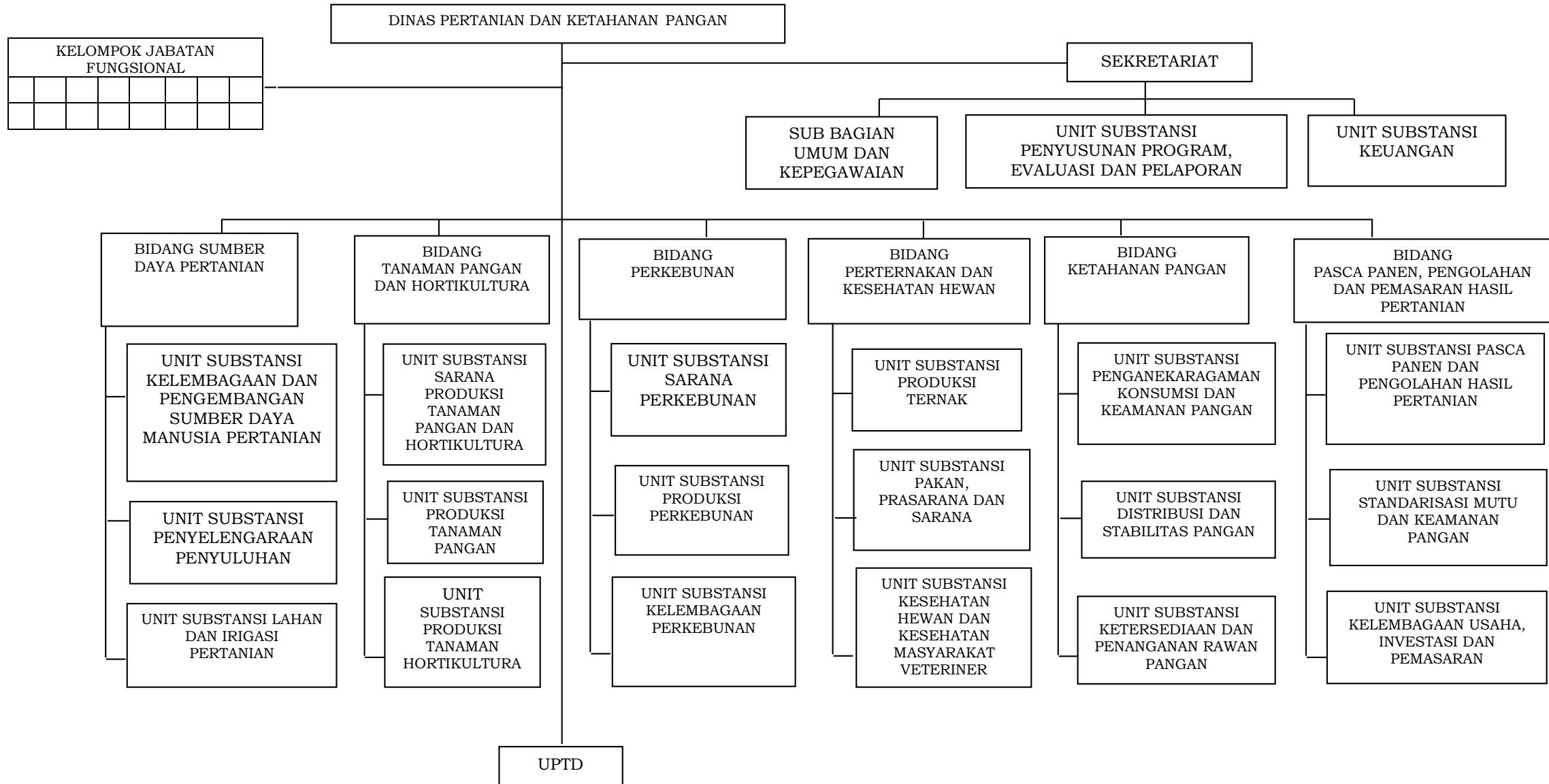
4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL



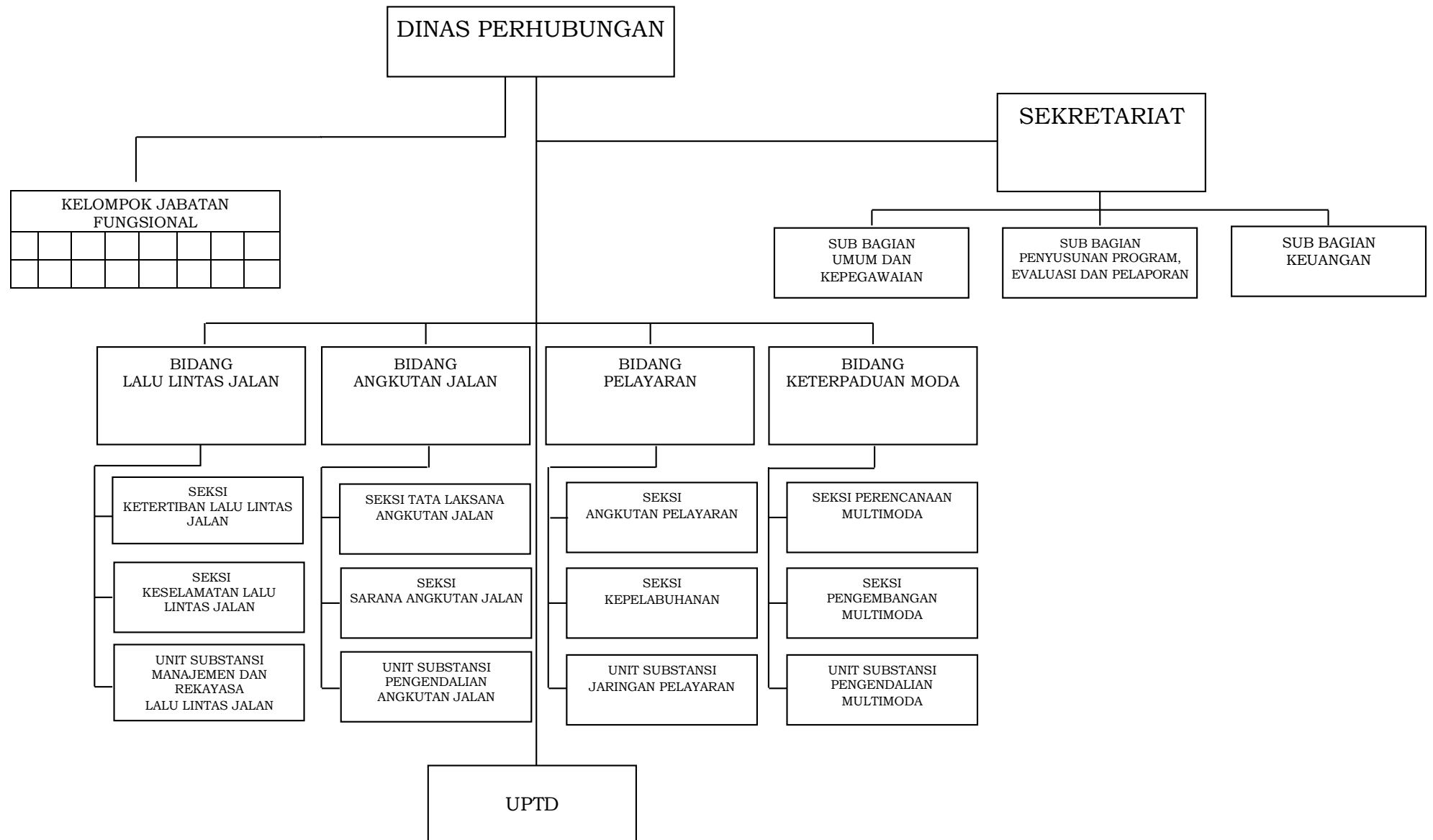
5. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK



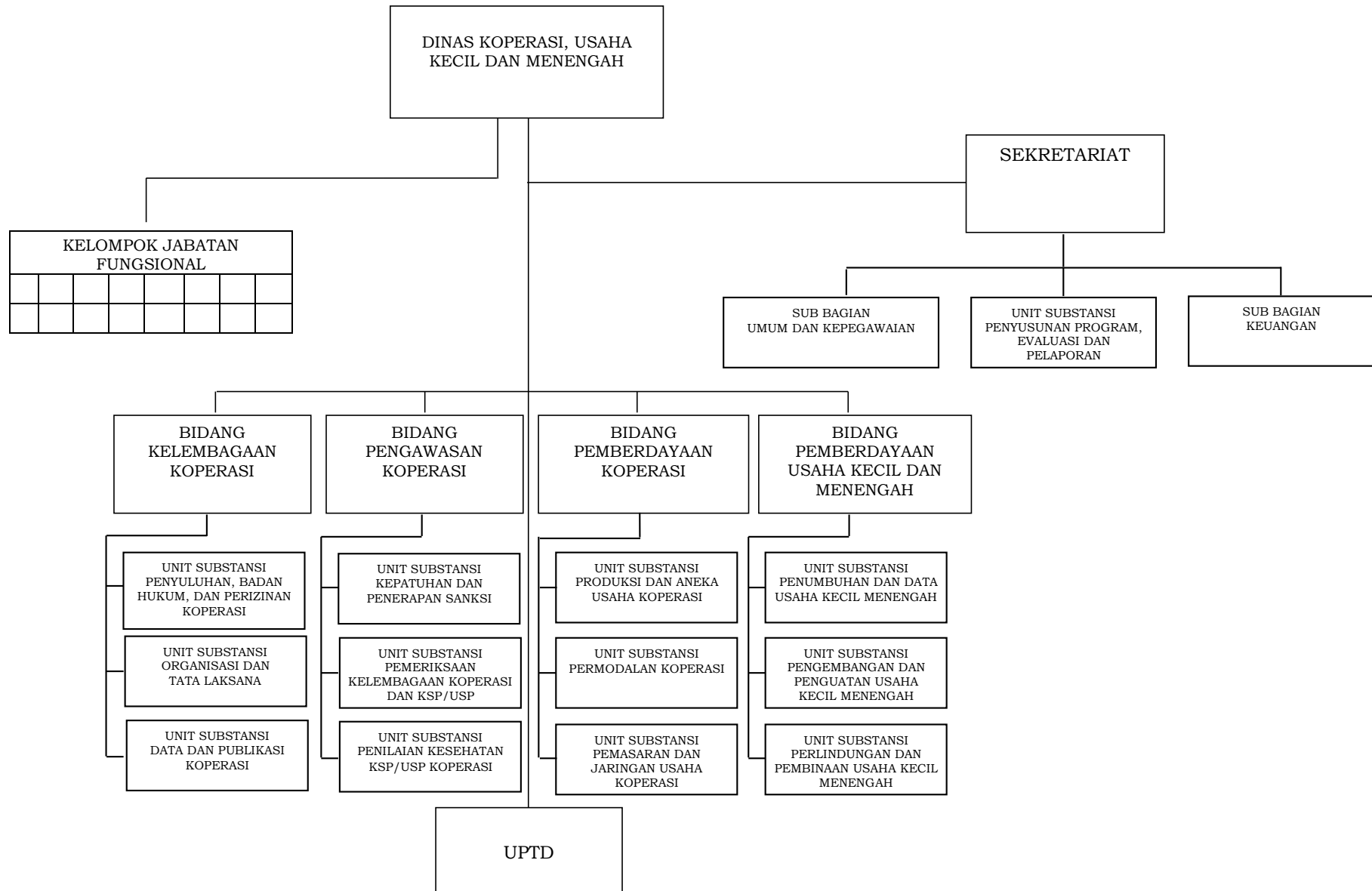
6. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



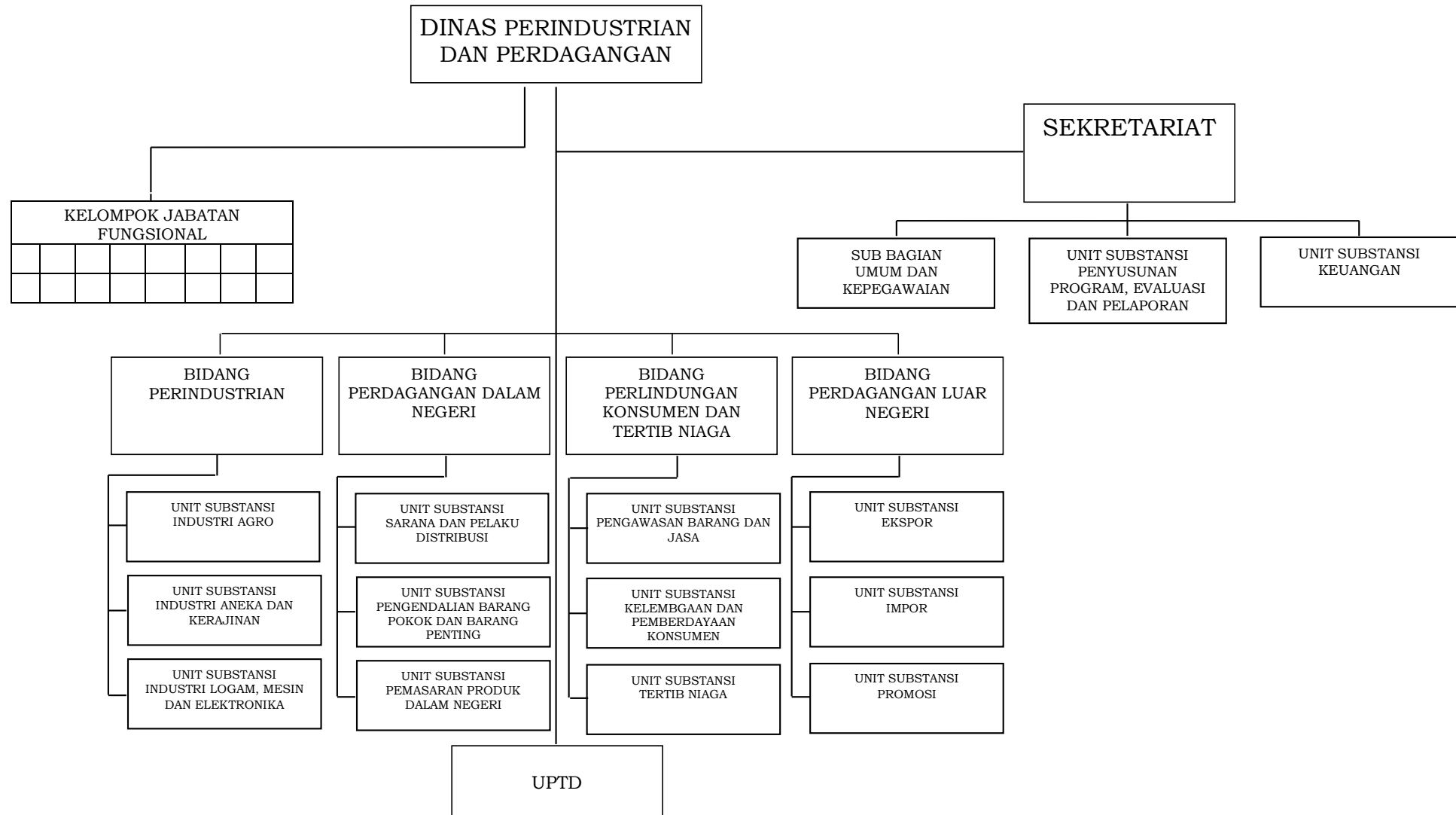
7. DINAS PERHUBUNGAN



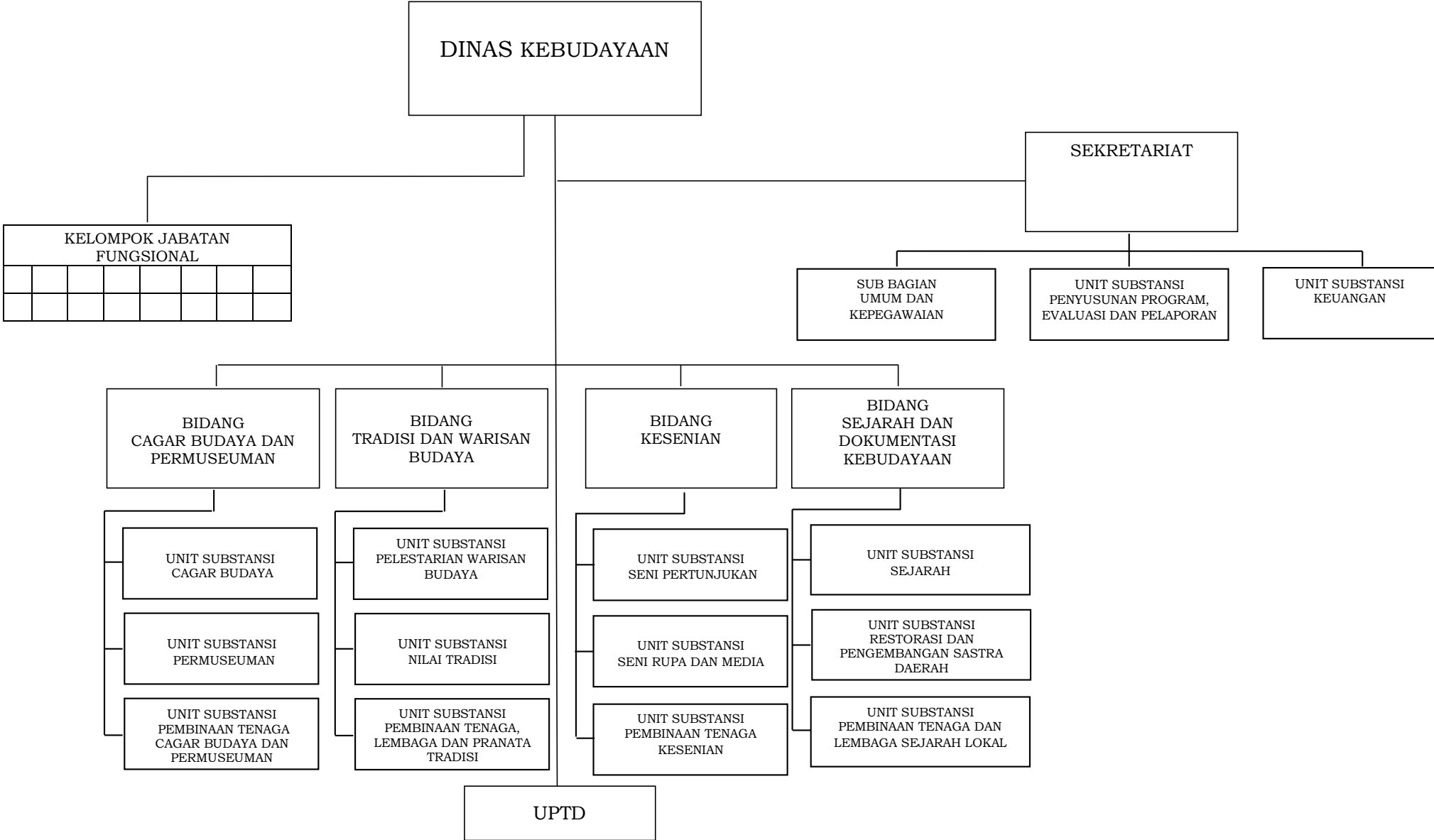
8. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



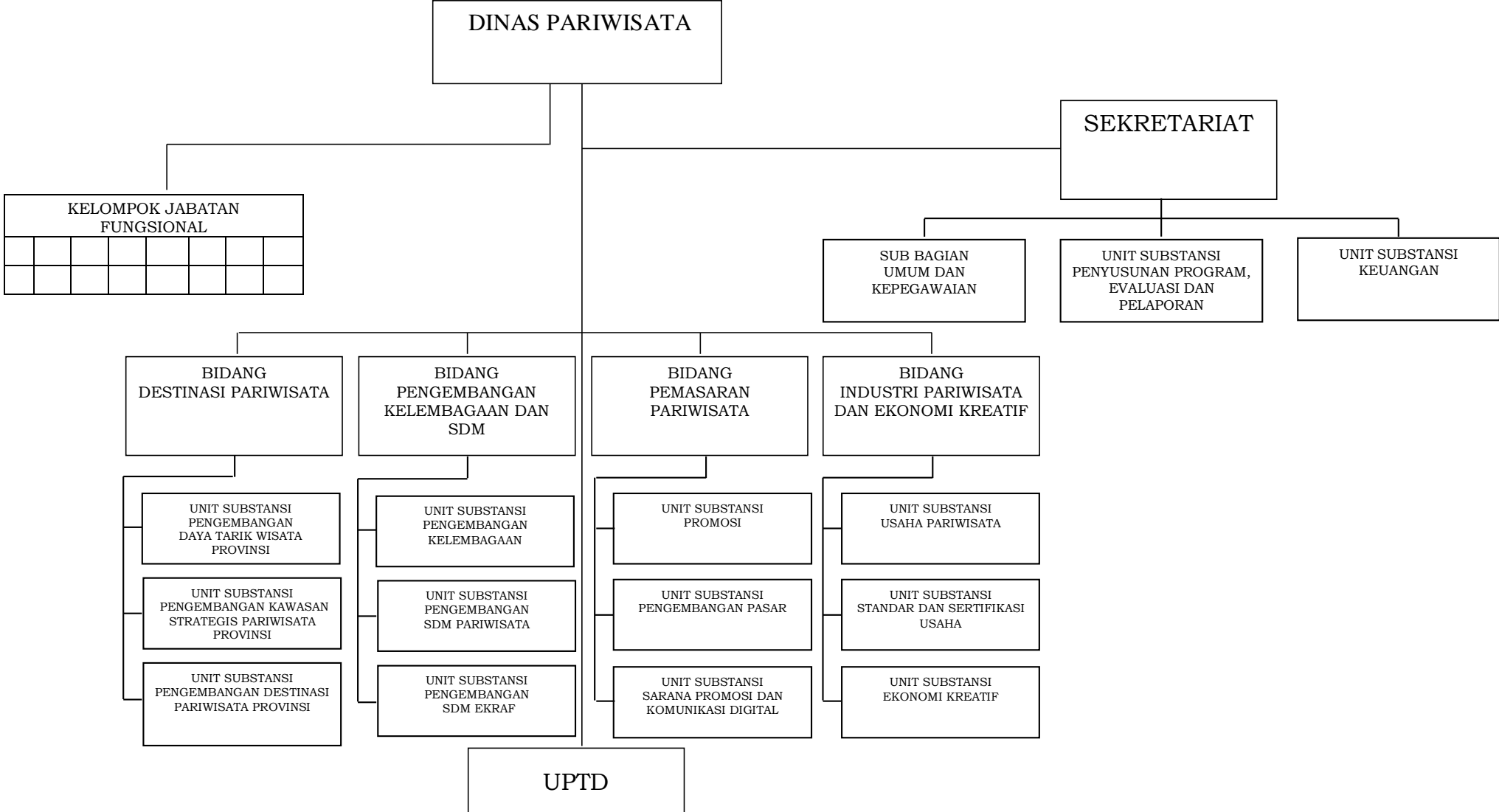
9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



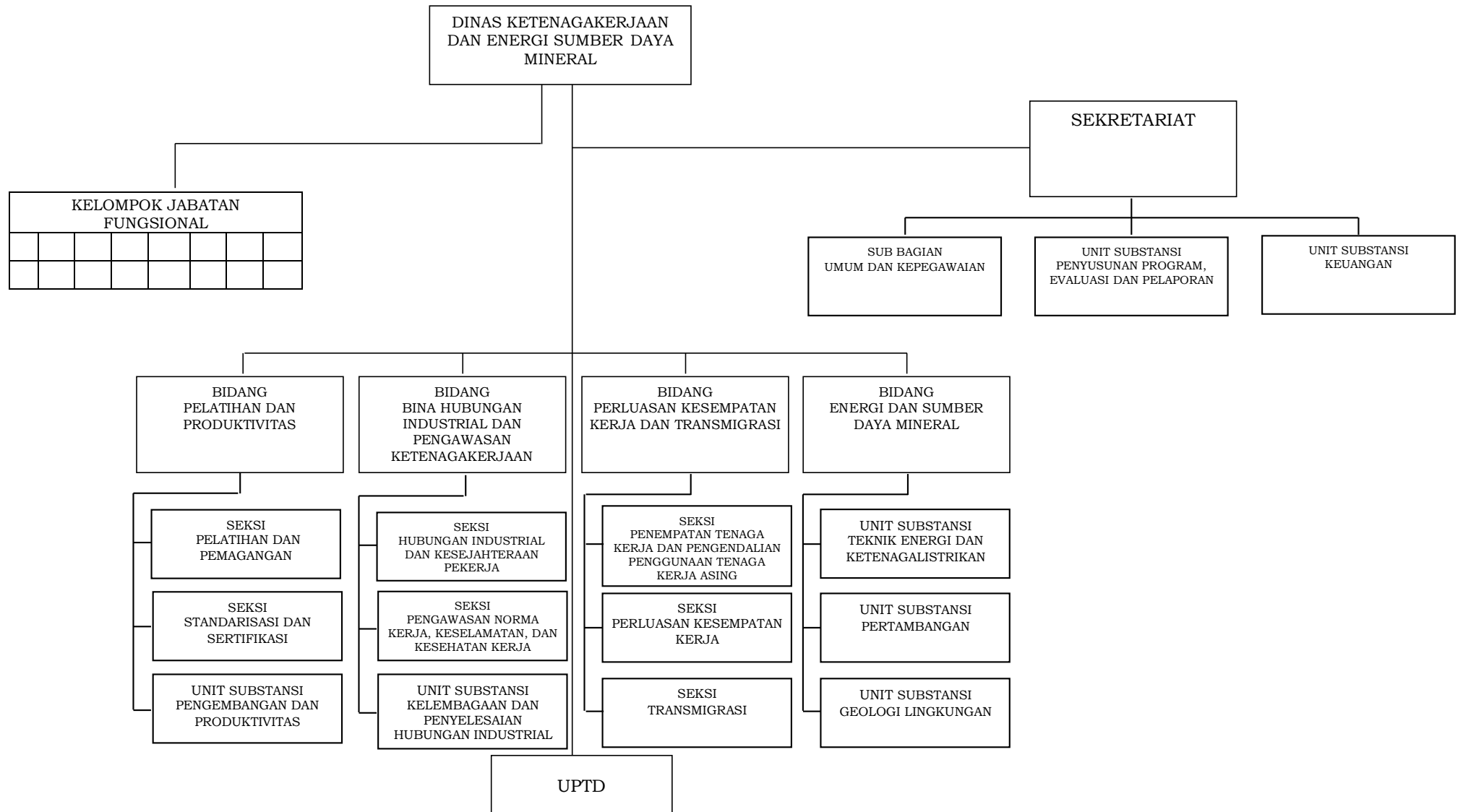
10. DINAS KEBUDAYAAN



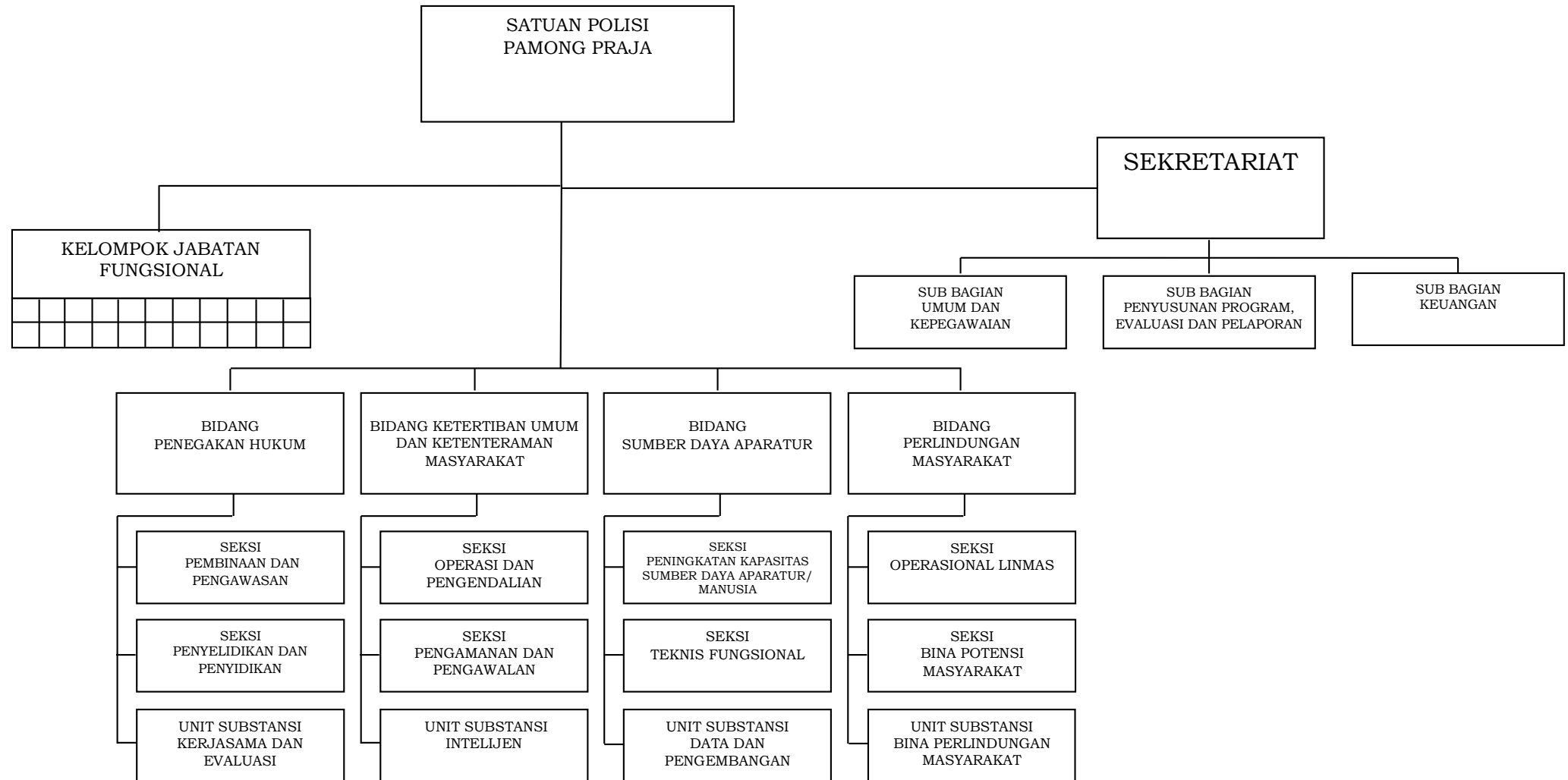
11. DINAS PARIWISATA



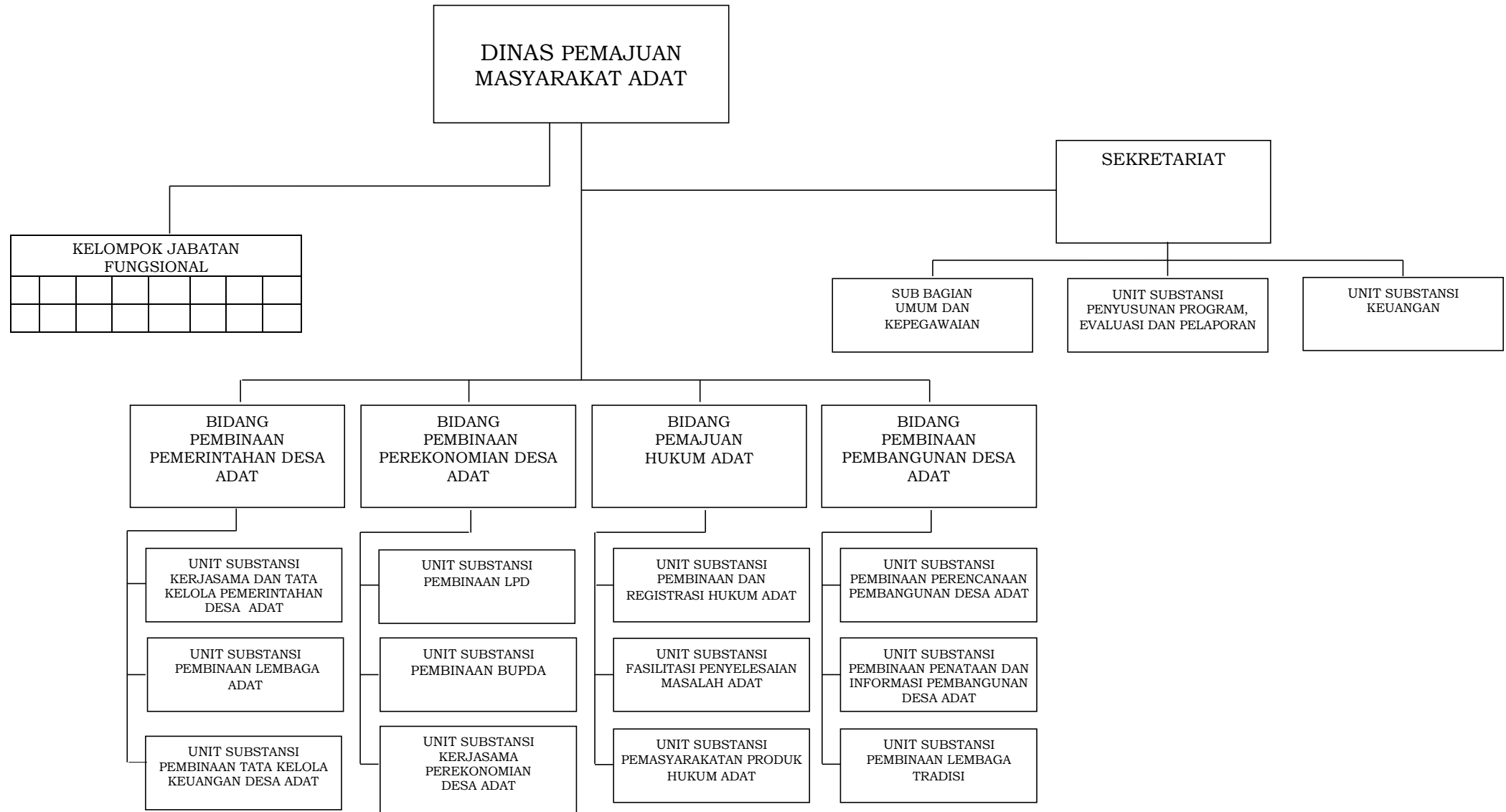
12. DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



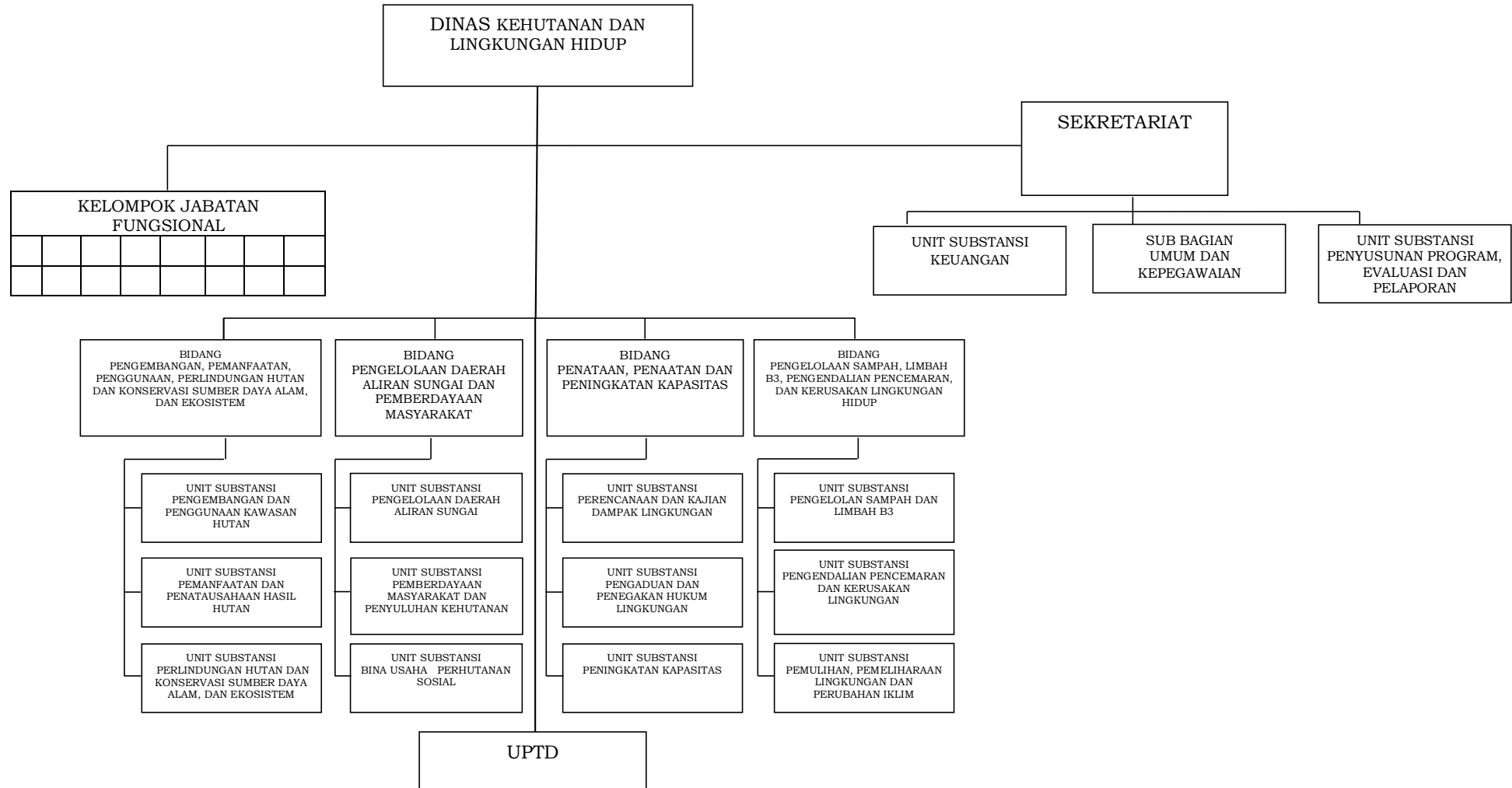
13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



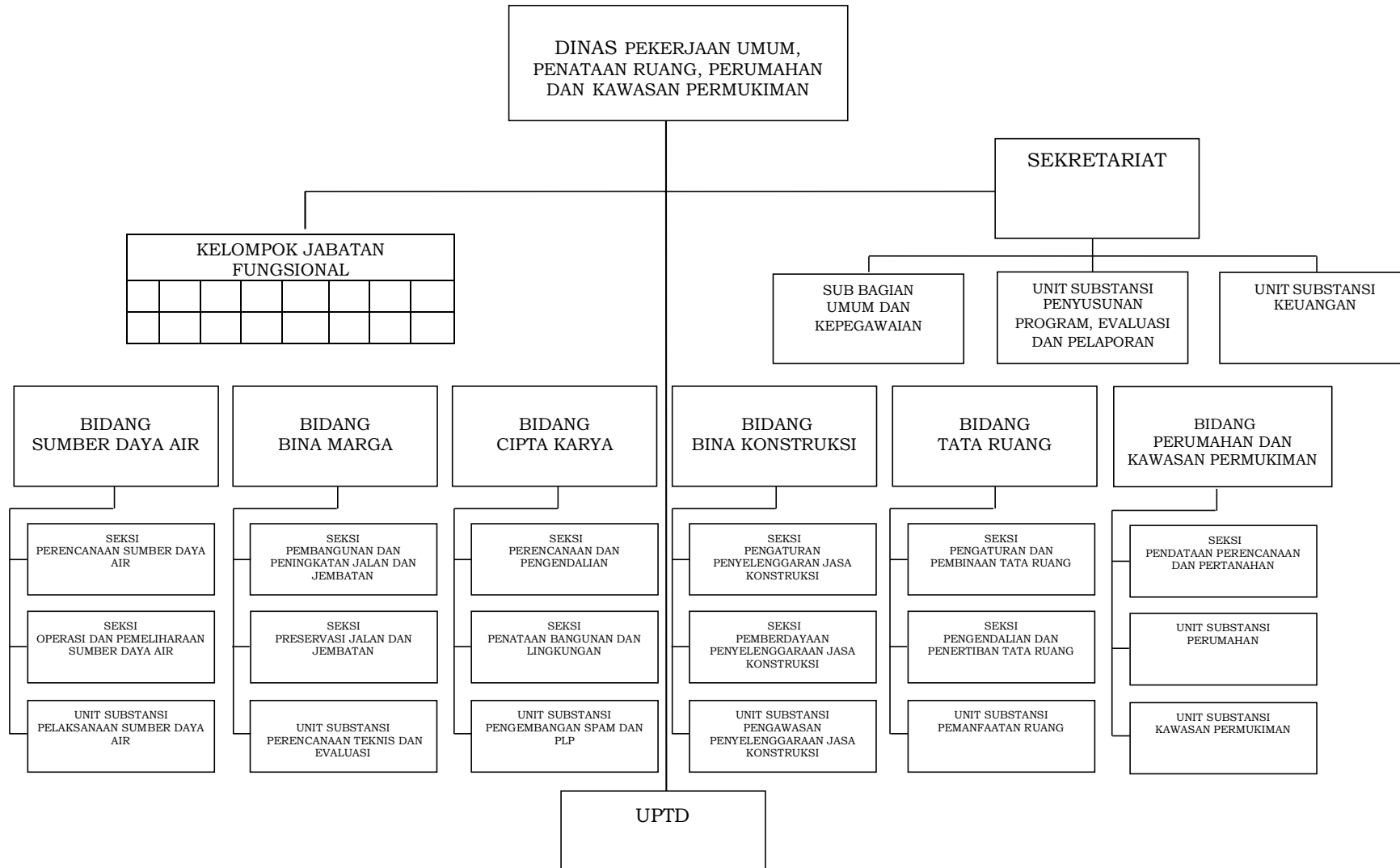
14. DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT



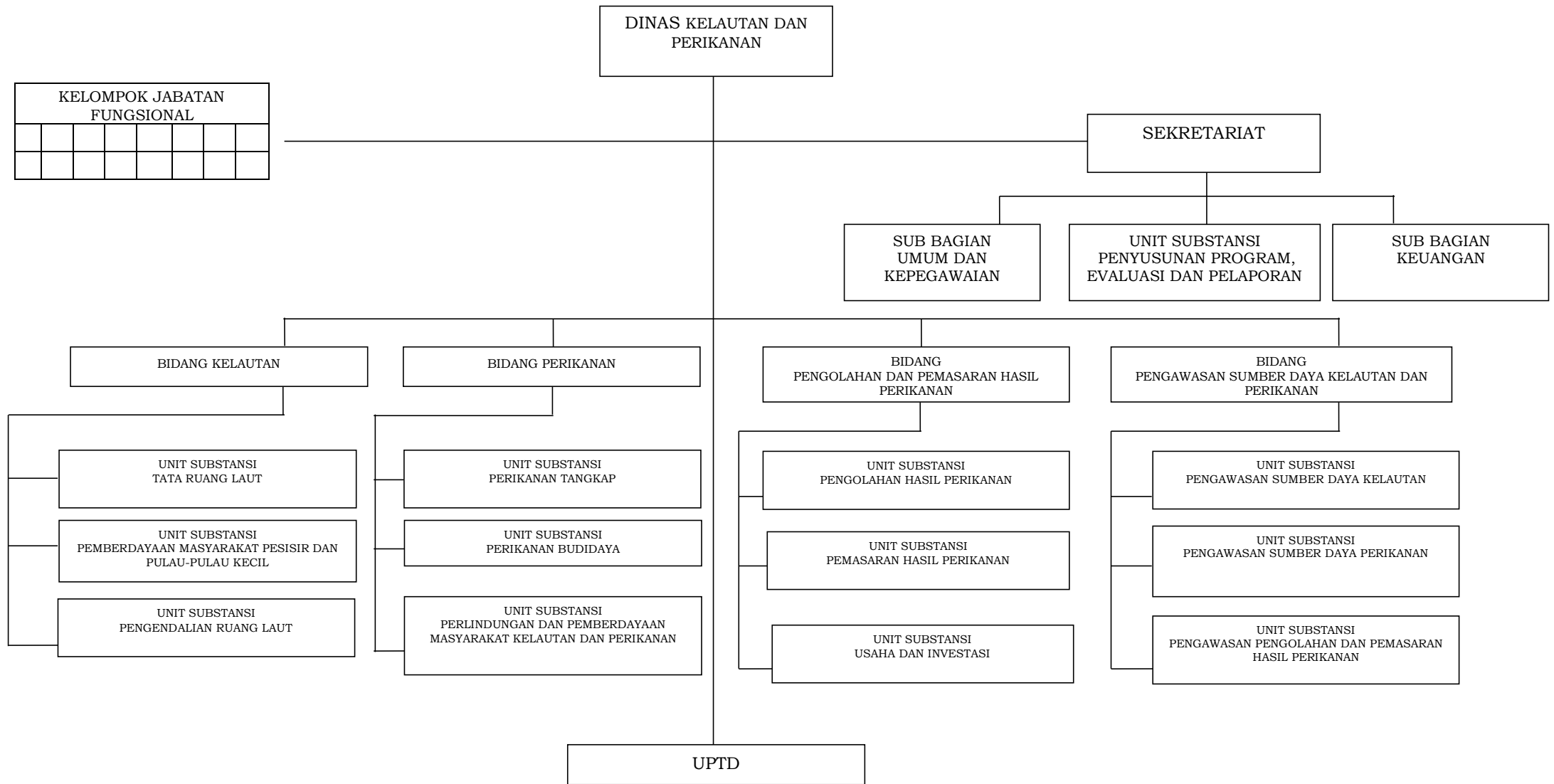
15. DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



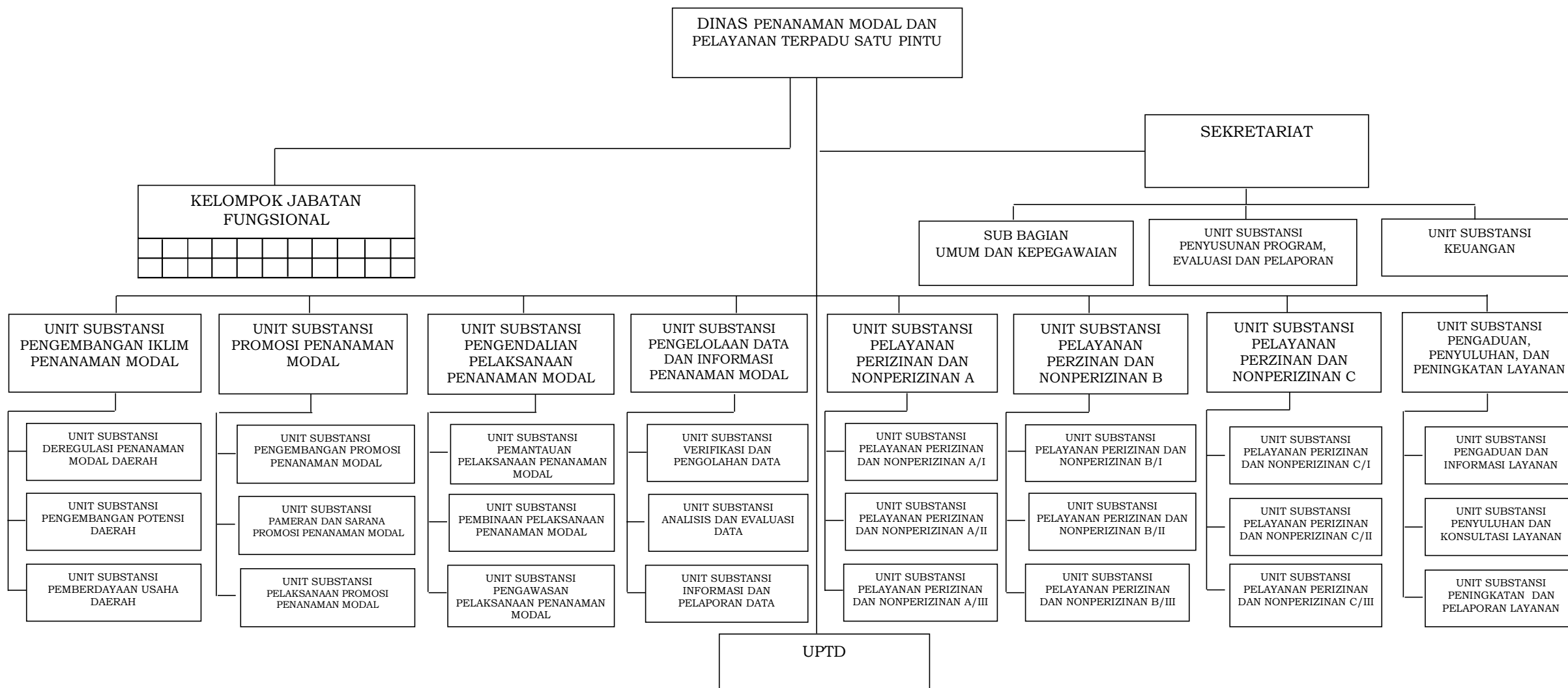
16. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



17. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

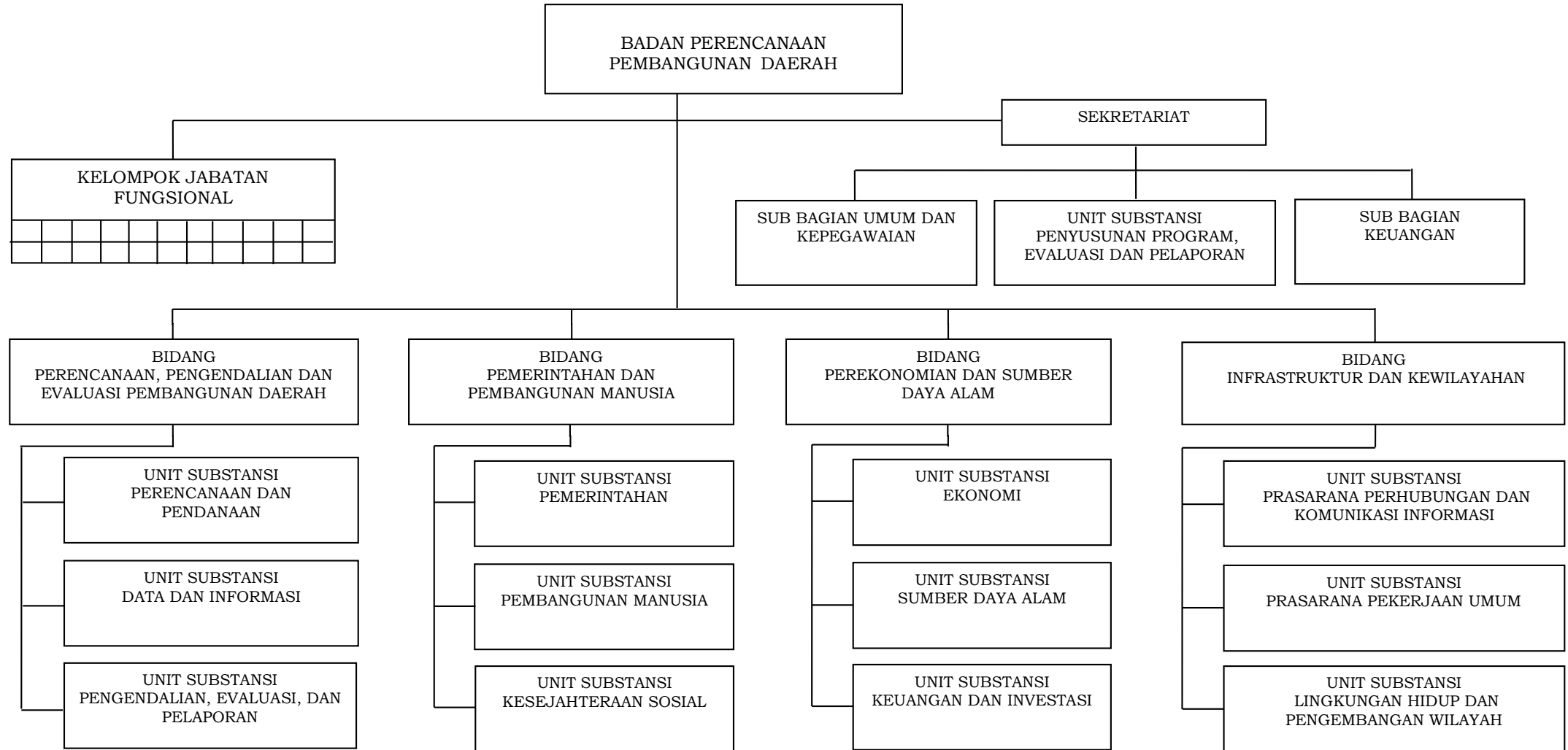


18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

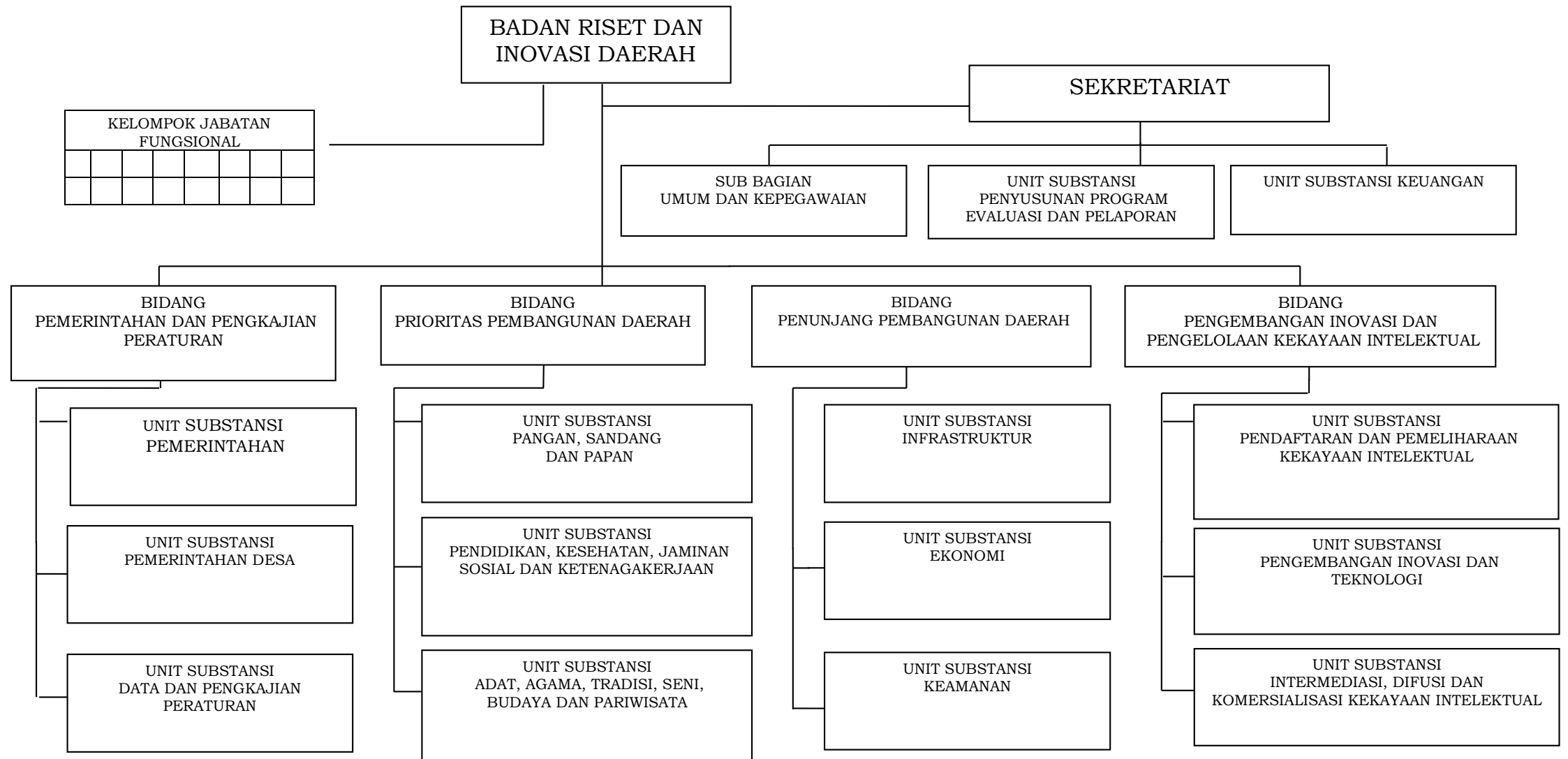


E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PROVINSI

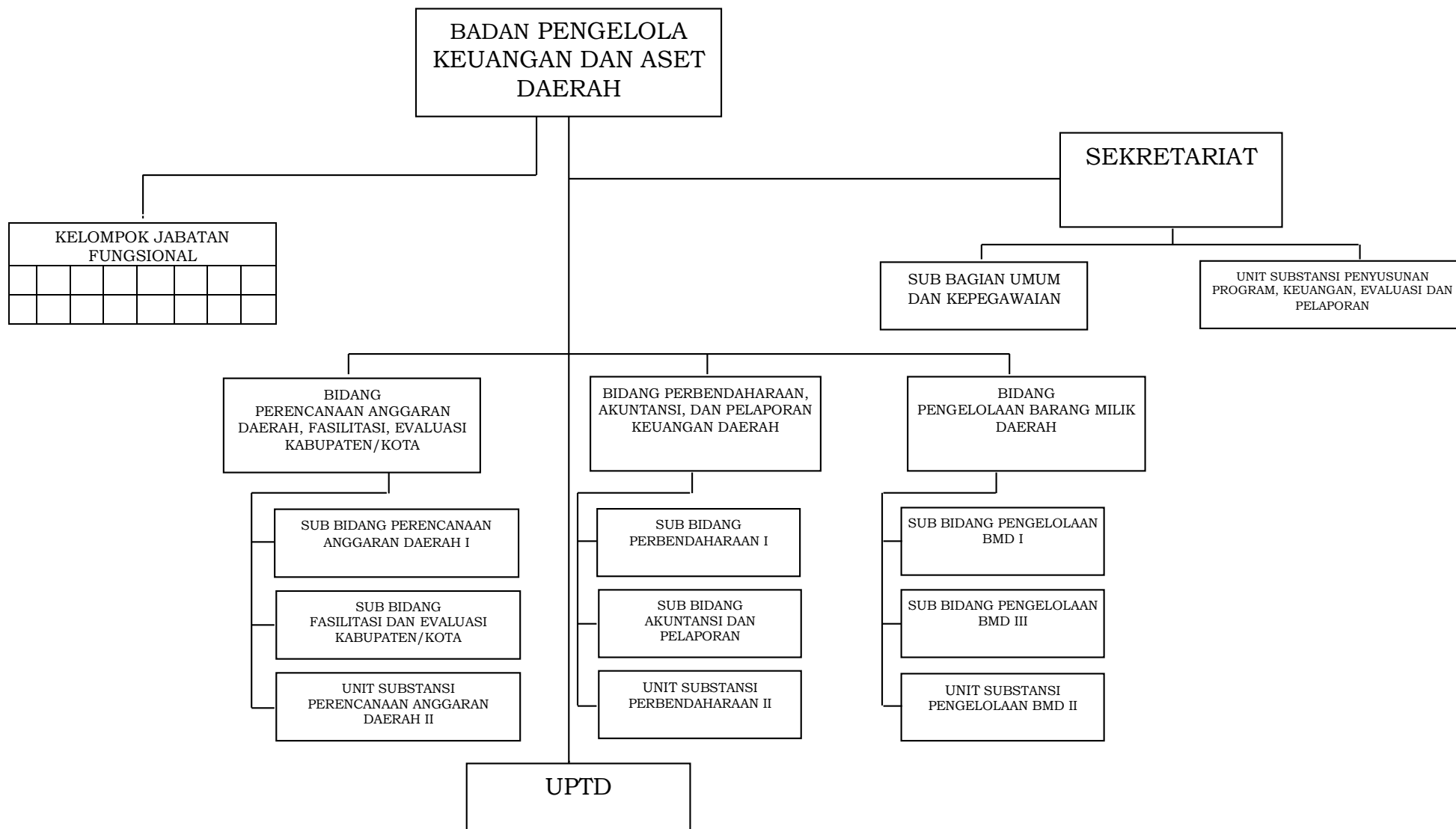
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



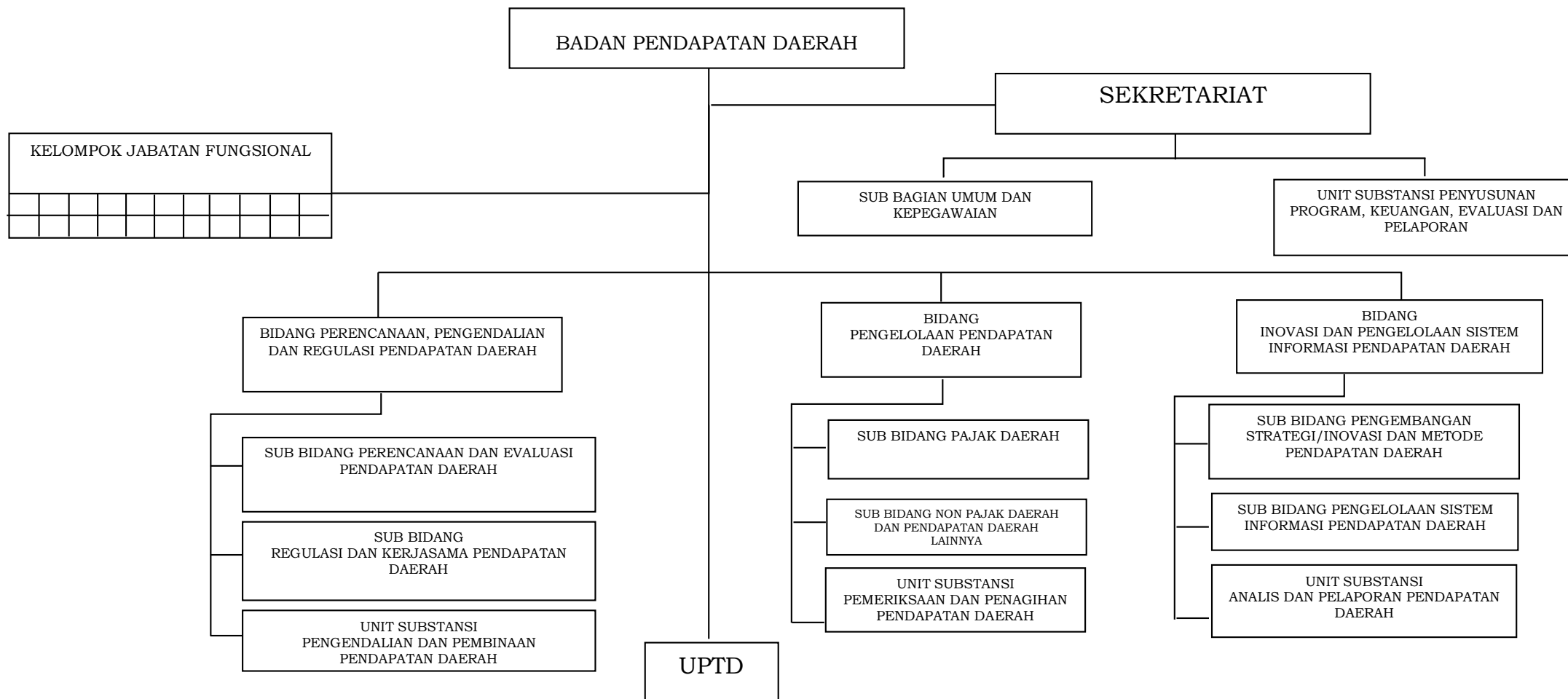
2. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



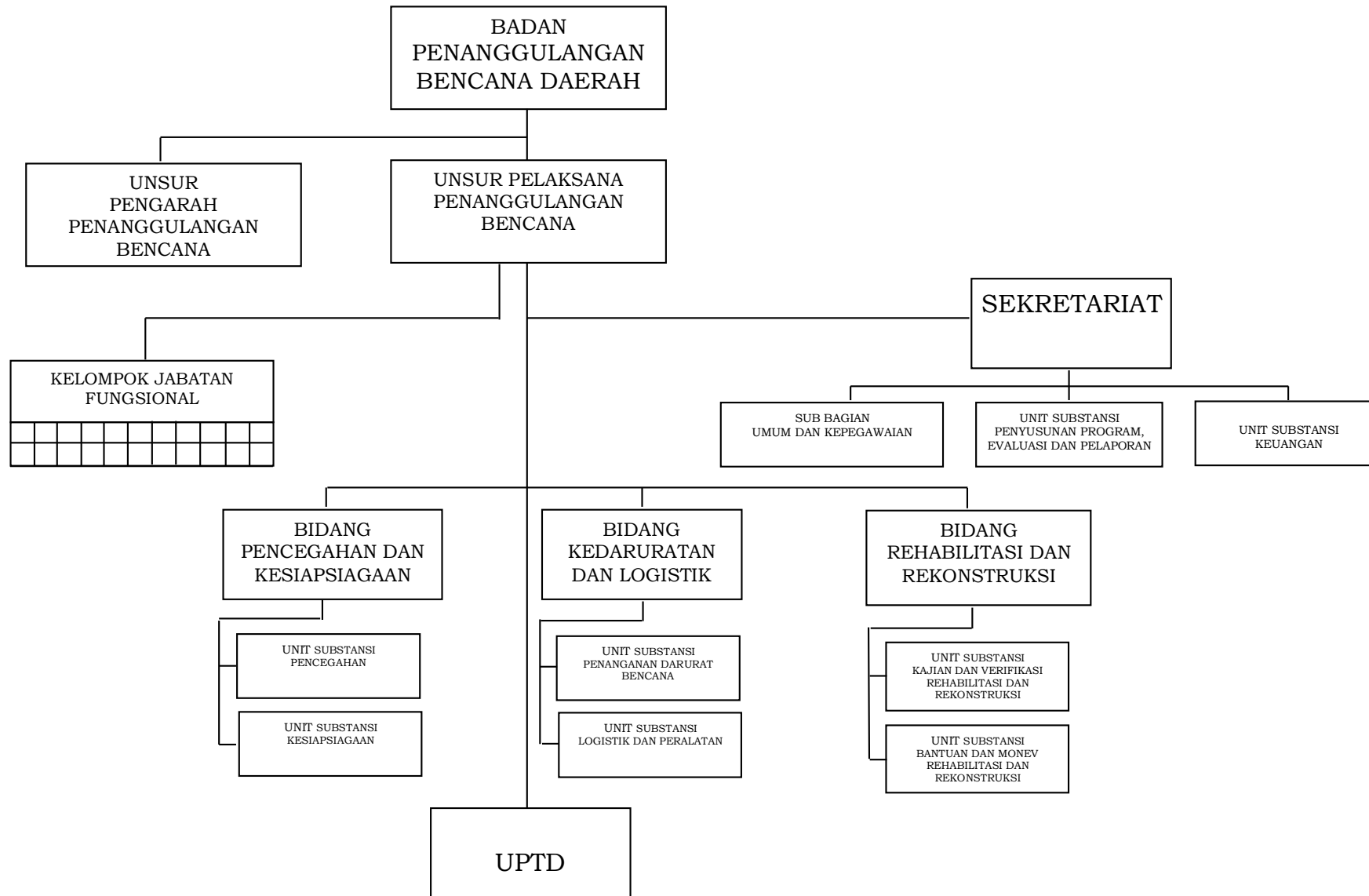
4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



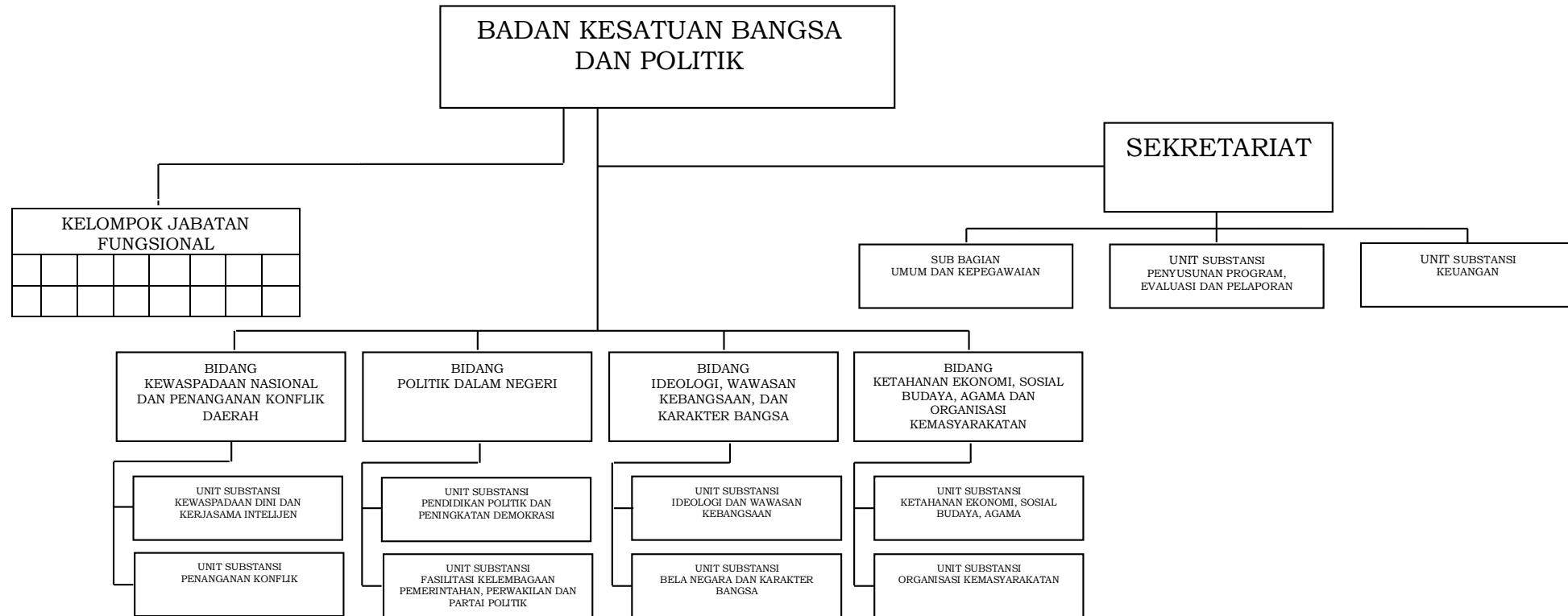
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH



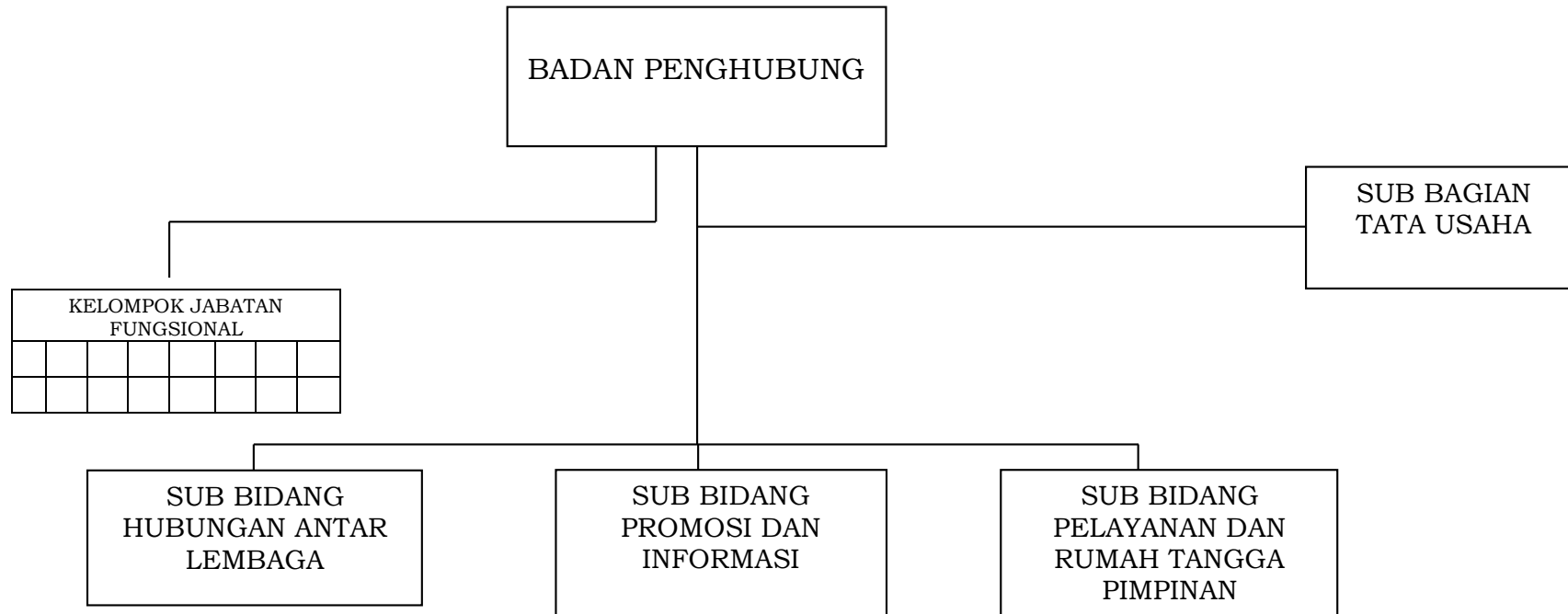
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



8. BADAN PENGHUBUNG



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012